



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2020



KATA PENGANTAR

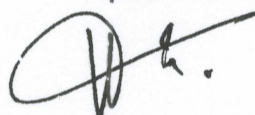
Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut ini menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan capaian Kinerja DPMPTSP dimasa yang akan datang.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Tentunya banyak kekurangan yang terdapat dalam Laporan Kinerja ini sehingga tegur sapa, saran dan masukan kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja yang kami sampaikan ini dapat memenuhi kriteria sebagai Laporan Kinerja yang diharapkan oleh pemerintah.

Pelaihari, Januari 2021

Kepala DPMPTSP



Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Pembina Utama
NIP. 19650116 199203 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil uraian pada Bab-Bab dari Laporan Kinerja ini diketahui bahwa

1. Pada Anggaran Murni tahun 2020, DPMPTSP mengelola Anggaran sebesar Rp12.087.447.135,- yang kemudian mengalami refocusing disebabkan adanya pandemi covid-19 menurun menjadi Rp8.977.400.135,-. Anggaran tersebut kemudian terkoreksi kembali meningkat pada APBD Perubahan 2020 menjadi menjadi Rp9.756.295.170,-.
2. Belanja Langsung DPMPTSP pada Anggaran Murni 2020 sebesar Rp5.606.863.320,- yang kemudian direfocusing menurun menjadi Rp2.748.713.409,- . Anggaran ini terkoreksi lagi meningkat menjadi 3.527.608.444,- pada APBD 2020 Perubahan.
3. Belanja Tidak Langsung DPMPTSP pada Anggaran Murni sebesar Rp6.480.584.134,- Pada saat terjadi refocusing menurun menjadi Rp6.228.686.726,-. Anggaran ini tetap bertahan pada APBD 2020 Perubahan.
4. Hasil serapan keuangan pada anggaran tahun 2020 adalah sebesar 74,64 % yang jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya yaitu 2019 sebesar 76,78% ini berarti terjadi penurunan serapan sekitar 2,14%. Penurunan serapan anggaran ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang terjadi yang mengakibatkan banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilakukan seperti pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tatap muka yang kemudian harus disesuaikan menjadi pertemuan secara daring (dalam jaringan) atau secara online. Selain itu banyak kegiatan Rapat koordinasi ke pemerintahan Propinsi dan Pusat yang juga tidak dapat dilaksanakan. Meskipun terjadi penurunan tetapi penurunan capaian ini tidak menurun secara signifikan.
5. Hasil realisasi fisik pada anggaran tahun 2020 adalah sebesar 95,80% yang jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya yaitu 2019 sebesar 96,74% ini berarti terjadi penurunan kinerja fisik sekitar 0,94%. Penurunan ini juga disebabkan pengaruh kondisi covid-19, dan sama dengan penurunan di serapan keuangan yang tidak signifikan, penurunan capaian kegiatan fisik sebesar 0,94% ini juga tidak signifikan.
6. Pada laporan kinerja tahun 2020 ini penyampaian kinerja disampaikan dari level eselon II, Eselon III, hingga level eselon IV sehingga penggambaran akuntabilitas kinerja diharapkan dapat tergambar secara lebih jelas per individu pejabatnya sebagai wujud pencapaian Perjanjian Kinerja tiap individu.

Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai gambaran ringkas pelaksanaan anggaran 2020 dan kinerja DPMPTSP Tanah Laut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	1
C. Isu Strategis	11
D. Produk dan Layanan	12
E. Sistematisa Penyajian	12
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	15
A. Visi RPJMD	15
B. Misi RPJMD	15
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	16
D. Indikator Kinerja Utama	18
E. Perjanjian Kinerja	19
F. Program dan Kegiatan	25
Bab III Akuntabilitas Kinerja	27
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	27
1. Sasaran RPJMD	27
2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Dinas	29
3. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Dinas	31
1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian	31
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan	33
3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan	34
4. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perizinan Tertentu	34
1) Akuntabilitas Kinerja Kasi Perizinan Tertentu	35
5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha	36
1) Akuntabilitas Kinerja Kasi Perizinan Jasa Usaha	36
6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan Pelayanan Perizinan	37
1) Akuntabilitas Kinerja Kasi Data dan Informasi	38
2) Akuntabilitas Kinerja Kasi Pengaduan Pelayanan	39
7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Bidang Penanaman Modal	40
1) Akuntabilitas Kinerja Kasi Pengawasan dan Pengendalian	41
2) Akuntabilitas Kinerja Kasi Pelayanan Penanaman Modal	41
3) Akuntabilitas Kinerja Kasi Promosi dan Investasi	42
B. Akuntabilitas Keuangan	43
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020	44
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	47
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020	50
Bab IV Penutup	60
A. Kesimpulan	60
B. Strategi Peningkatan Kinerja	60

Lampiran

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 bertanda tangan
4. Cascading/Pohon Kinerja
5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja DPMPTSP Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis kepada Bupati Tanah Laut atas pencapaian kinerja DPMPTSP selama tahun anggaran 2020.

Tahun Anggaran 2020 ini dapat dikatakan begitu banyak dinamika eksternal seperti munculnya pandemic covid-19, refocusing anggaran menyebabkan menurunnya tingkat capaian baik pada kinerja fisik dan keuangan merupakan kondisi yang harus menjadi tanggung jawab DPMPTSP.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

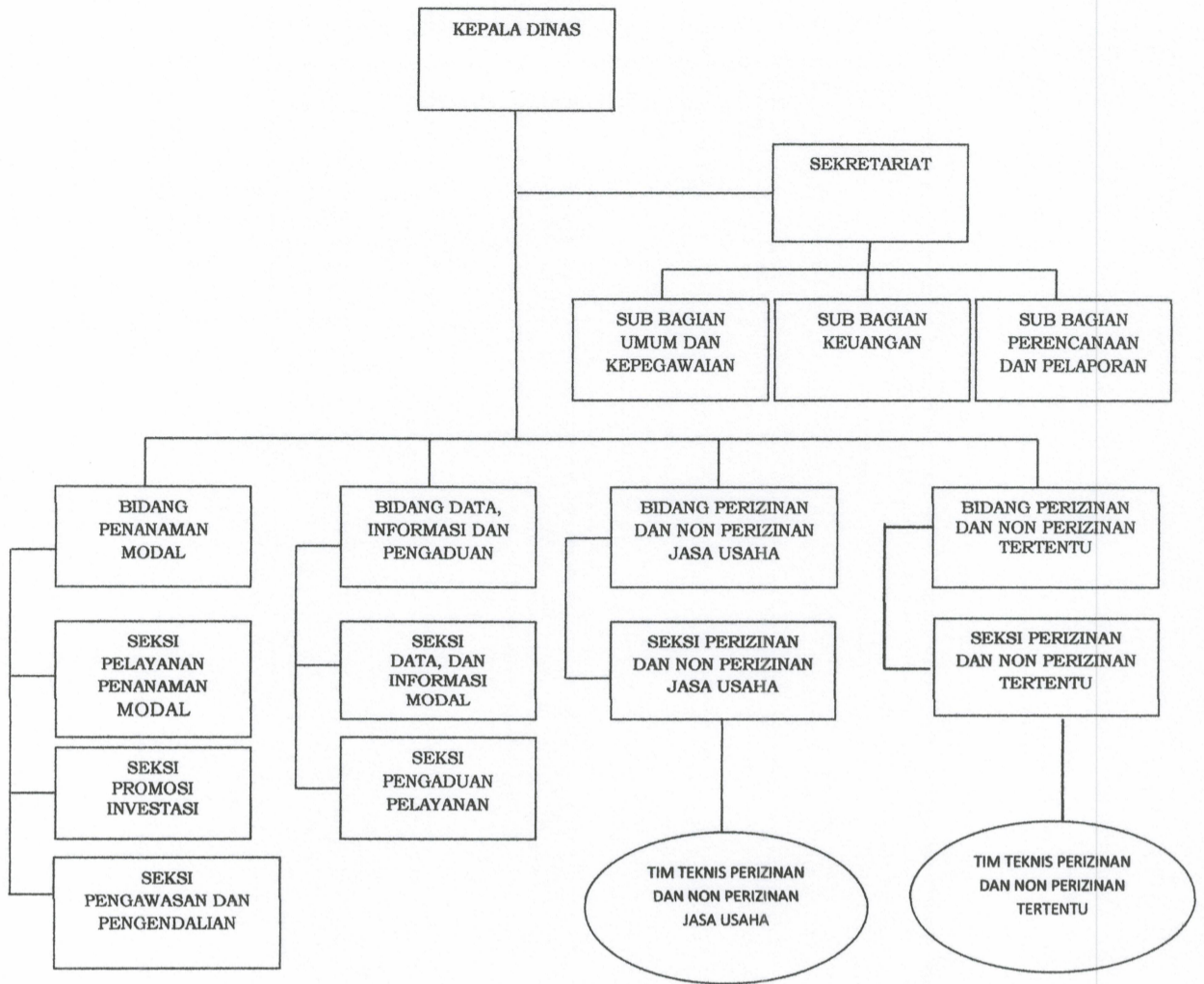
Tujuan penyusunan Laporan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
- c. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya
- d. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- e. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, SOTK DPMPTSP dapat dilihat pada bagan berikut :



Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa DPMPTSP Tanah Laut dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orang kasubbag dan dibantu pula oleh 4 (empat) orang Kepala Bidang. Kepala Bidang Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) Kasi, Kepala Bidang Data Informasi dan Pengendalian memiliki 2 (dua) Kasi, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha memiliki 1 (satu) Kasi dan Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu membawahi 1 (satu) Kasi.

Adapun detail numenklatur tiap jabatan yang ada di DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
2. Sekretaris, yang membawahi 3 orang Kasubbag yaitu :
 - 1) Kasubbag Perencanaan
 - 2) Kasubbag Keuangan
 - 3) Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Penanaman Modal, yang membawahi 3 orang Kasi yaitu :
 - 1) Kasi Promosi Investasi
 - 2) Kasi Pelayanan Penanaman Modal
 - 3) Kasi Pengawasan dan Pengendalian
4. Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengendalian, yang membawahi 2 orang Kasi yaitu :
 - 1) Kasi Data dan Informasi
 - 2) Kasi Pengaduan dan Pelayanan
5. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha, yang membawahi 1 Kasi yaitu :
 - 1) Kasi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha
6. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu, yang membawahi 1 Kasi yaitu:
 - 1) Kasi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu

Terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah

- pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu..
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas.
 - e. Pembinaan UPT Badan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara detil, setiap jabatan yang ada di DPMPTSP mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
 - a) Pengekoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - b) Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - c) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - d) Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e) Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
 - f) Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan program kegiatan serta penataan barang;
 - g) Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h) Pengekoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan

data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- i) Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sekretariat membawahi :
- a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran belanja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
 - b) Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

2. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana bidang penanaman modal
- 2) Perumusan kebijakan bidang penanaman modal
- 3) Penyusunan perencanaan penanaman modal
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal
- 5) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal
- 6) Pelaksanaan kerjasama, promosi dan investasi penanaman modal
- 7) Pelaksanaan pelayanan penanaman modal
- 8) Pelaksanaan pembuatan peta penanaman modal
- 9) Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal dalam negeri dan modal asing
- 10) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penanaman modal
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 12) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-alangkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Penanaman Modal membawahi :

- 1) Kasi Promosi Investasi
Kasi Promosi investasi melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait promosi dan investasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- 2) Kasi Pelayanan Penanaman Modal
Kasi Promosi investasi melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan penanaman modal
- 3) Kasi Pengawasan dan Pengendalian

Kasi Pengawasan dan pengendalian melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengawasan dan pengendalian DPMPTSP

3. Bidang Data, Informasi dan Pengaduan

Bidang Data, Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan data dan informasi serta pengaduan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Data, Informasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang data, informasi dan pengaduan
- 2) Perumusan kebijakan bidang data, informasi dan pengaduan
- 3) Penyusunan perencanaan pelayanan data, informasi dan pengaduan
- 4) Perumusan kebijakan teknis pelayanan data, informasi dan pengaduan
- 5) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang data, informasi dan pengaduan
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang data, informasi dan pengaduan
- 7) Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi
- 8) Pelaksanaan pengaduan pelayanan
- 9) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan data, informasi dan pengaduan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 11) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Data, Informasi dan Pengaduan membawahi :

- 1) Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang data dan informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2) Seksi Pengaduan Pelayanan

Seksi Pengaduan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang data dan informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha

Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha
- 2) Perumusan kebijakan bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha
- 4) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perizinan dan non perizinan jasa usaha
- 5) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan jasa usaha meliputi surat keterangan tempat usaha, izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, izin usaha peternakan, pendaftaran peternakan rakyat, tanda daftar industri, izin usaha industri, izin usaha perkebunan, izin usaha konstruksi, izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T), izin penangkapan ikan (SIPI), izin usaha pengangkutan ikan (SIKPI), izin usaha perikanan, izin usaha toko modern, izin usaha pusat pembelanjaan, izin praktek dokter hewan, izin penyelenggaraan kursus, izin rumah sakit dan rumah sakit bersalin swasta, izin klinik swasta, izin

klirik perusahaan, izin apotek, izin toko obat dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 6) Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan proses penerbitan perizinan dan non perizinan jasa usaha.
- 7) Pengkoordinasian penyelenggaraan penerbitan perizinan dan non perizinan jasa usaha
- 8) Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perizinan dan non perizinan jasa usaha
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 10) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha membawahi :

- 1) Seksi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha

Seksi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan perizinan jasa usaha

5. Bidang Perizinan Tertentu

Bidang Perizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan perizinan jasa usaha

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perizinan Tertentu menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang perizinan dan non perizinan tertentu
- 2) Perumusan kebijakan bidang perizinan dan non perizinan tertentu
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perizinan dan non perizinan tertentu
- 4) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang perizinan dan non perizinan tertentu

- 5) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan tertentu meliputi izin gangguan (HO), izin mendirikan bangunan/membongkar bangunan, izin hiburan umum, izin reklame, izin usaha perhotelan/penginapan, izin usaha rumah makan/restauran, izin pemanfaatan/pemungutan sarang burung walet, izin usaha perebengkelan, izin usaha kepariwisataan, izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi, izin penggilingan padi dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan proses penerbitan perizinan dan non perizinan tertentu
- 7) Pengkoordinasian penyelenggaraan penerbitan perizinan dan non perizinan tertentu
- 8) Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perizinan dan non perizinan tertentu
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 10) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Perizinan Tertentu membawahi :

- 1) Seksi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu

Seksi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan perizinan jasa tertentu.

6. Tim Teknis

1. Tim teknis adalah sebuah tim yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan

2. Tim Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala Badan/Dinas yang bersangkutan
3. Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
4. Pelaksanaan Kerja Tim Teknis berada dan ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi DPMPTSP diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DPMPTSP di masa lima tahun mendatang. Isu strategis merupakan suatu kondisi / permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Terdapat beberapa akar masalah yang sampai saat ini masih ditemukan, yaitu:

1. Belum optimalnya Kualitas SDM

Kualitas Sumber Daya Manusia dalam peningkatan pelayanan perizinan dan on perizinan sehingga perlu adanya pelaksanaan BIMTEK bagi Tim Teknis beserta seluruh ASN DPMPTSP.

2. Kurangnya Jumlah Investasi Pelaku Usaha

Selama Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami penurunan diakibatkan adanya pandemi COVID dan kurangnya promosi investasi seperti pameran investasi

3. Kurang optimalnya jaringan internet

Sesuai SOP Pelayanan maka setiap pelayanan perizinan dan non perizinan diwajibkan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Kurang optimalnya jaringan internet membuat pelayanan menjadi lambat.

D. Produk dan Layanan

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kemudian untuk Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dari Perda ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut (DPMPTSP). Sesuai dengan nomenklatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2016 tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai produk layanan utama yaitu :

- 1) Penanaman Modal dan
- 2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berusaha

Untuk layanan Penanaman Modal khususnya untuk Kabupaten/Kota hanya melayani investasi 10 Milyar kebawah, sedangkan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk kewenangan Bupati yang menyangkut Perizinan dan Non Perizinan sudah didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2020 berpedoman pada Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 065/3613/ORG tanggal 18 Desember 2020 perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2020, sebagai berikut :

1. DAFTAR ISI
2. RINGKASAN EKSEKUTIF

Daftar Isi :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 1. Sasaran RPJMD
 2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Dinas
 3. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Dinas
 - 1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan
 - 3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan
 4. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perizinan Tertentu
 - 1) Akuntabilitas Kinerja Kasi Perizinan Tertentu
 5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha
 - 1) Akuntabilitas Kinerja Kasi Perizinan Jasa Usaha
 6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Data, Informasi, dan Pengaduan
 - 1) Akuntabilitas Kinerja Kasi Data dan Informasi
 - 2) Akuntabilitas Kinerja Kasi Pengaduan Pelayanan

7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penanaman Modal
 - 1) Akuntabilitas Kinerja Kasi Pengawasan dan Pengendalian
 - 2) Akuntabilitas Kinerja Kasi Pelayanan Penanaman Modal
 - 3) Akuntabilitas Kinerja Kasi Promosi dan Investasi
- B. Akuntabilitas Keuangan
 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020
 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2020
4. Cascading / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan kondisi ideal dan gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Visi diperlukan untuk menjadi tuntunan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan segala aktifitas organisasi. Visi dirumuskan atas dasar pemahaman yang akurat sesuai dinamika kehidupan, citra dan peran Pemerintah Kabupaten serta kepekaannya pada situasi yang ada. Selain itu, visi harus inspiratif dan dapat memberi motivasi kepada suatu anggota organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 yaitu : **“Tewujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi”** (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi.

B. Misi RPJMD

Misi adalah merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Dikaitkan dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), maka tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) terkait erat dengan penjabaran Misi ke-1 RPJMD yaitu **“Berkarya Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya”** dan Misi ke-5 RPJMD yaitu **“Membangun**

Sinergitas yang baik antar Tingkat Pemerintah dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan sebuah misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Adanya tujuan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut akan memudahkan bagi organisasi untuk mencapai kinerja yang diinginkan karena telah ditetapkan tujuan apa yang akan di capai sesuai dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disepakati. Adapun tujuan yang mau di capai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu 2018 – 2023 yaitu :

- 1) Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kabupaten Tanah Laut
- 2) Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

2. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut kedalam sasaran. Oleh karena itu sasaran harus terinci dan terukur. Adapun yang menjadi sasaran dari tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut
- 2) Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi
- 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan
- 4) Meningkatnya efektivitas pelayanan perizinan dan non perizinan
- 5) Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha
- 6) Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan, Perizinan Tertentu
- 7) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

- 8) Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan
- 9) Meningkatnya Kelancaran Operasional Administrasi Umum, dan Kepegawaian
- 10) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan.

Penjabaran tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan disajikan dalam tabel berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	25%	1. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Peningkatan iklim investasi	Meningkatkan pelayanan dan promosi potensi investasi
					Meningkatkan Pemantauan dan Pengawasan investasi terhadap pelaku usaha
					Penguatan regulasi dan pengembangan penanaman modal
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	80 (Baik)	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non perizinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan

					Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur DPMPPTSP
					Merumuskan mekanisme pelaksanaan system pelayanan perizinan dan non perizinan
					Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dinas

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama

NO	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan /sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab/Sumber Data
1	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	$\frac{\sum \text{Investasi tahun } n}{\sum \text{Target tahun } n} \times 100\%$ <p>Prosentase meningkatnya Investasi 5% Per Tahun</p>	Kepala Dinas, Bidang Penanaman Modal

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Hasil Survey 80 (delapan puluh) / Baik	Kepala Dinas, Bidang Data Informasi dan Pengaduan
---	---	---	---	--

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagai instansi pemerintah kabupaten Tanah Laut maka DPMPTSP juga membuat perjanjian kinerja untuk tahun anggaran 2020. Perjanjian Kinerja ditanda tangani oleh para pihak terkait. Ketentuan penandatanganan Perjanjian Kinerja ini diatur sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) dengan tingkat Eselon II, disusun oleh pimpinan SKPD yang kemudian ditandatangani oleh Bupati (Terlampir).
2. Selain antara pimpinan SKPD dengan Bupati, DPMPTSP juga melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/ Kepala Bidang (Eselon III) dengan Pimpinan SKPD, serta Kepala Sub bagian/bidang (Eselon IV) dengan Sekretaris/Kepala Bidang (Eselon III) untuk menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Rincian perjanjian kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sesuai dengan format pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagaimana terlampir. Perjanjian Kinerja SKPD DPMPTSP adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

ESSELON II (KEPALA DINAS)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Investasi Daerah 	887.542.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Masyarakat 	80

ESSELON III (SEKRETARIS)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	<ol style="list-style-type: none"> Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>A</p>

ESSELON III (KABID PENANAMAN MODAL)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Kenaikan Pelaku Investasi 	6 Buah

ESSELON III (KABID DATA, INFORMASI DAN PENGADUAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2. Persentase Pelayanan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan 3. Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur 4. Persentase Ketersediaan Data Perizinan dan Non Perizinan	Turun 5% (125) 3.082 Naik 5% 20Org 100%

ESSELON III (KABID PERIZINAN JASA USAHA)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	1. Persentase Permohonan Izin yang divalidasi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	(5%) 2.626 Izin

ESSELON III (KABID PERIZINAN TERTENTU)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	1. Persentase Permohonan Izin yang divalidasi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	(5%) 456 Izin

ESSELON IV (KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja DPMPTSP	1. Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja SKPD 2. Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dok 2 Dok

ESSELON IV (KASUBBAG KEUANGAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyusun dan Merencanakan Administrasi Keuangan	1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	37 Dok

ESSELON IV (KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menyusun Data Kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian	1. Jumlah Dokumen Kepegawaian yang dilayani secara Tertib	1 Dok
	Merencanakan dan Mengadakan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	2. Jumlah Dokumen Asset terkait Sarana dan Prasarana	1 Dok
	Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	3. Jumlah Bimtek untuk aparatur yang dilaksanakan	3 Org

ESSELON IV (KASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan terhadap Perusahaan	1. Jumlah Perusahaan yang dimonitoring dan dievaluasi 2. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	10 Perusahaan 5 Dok

ESSELON IV (KASI PELAYANAN PENANAMAN MODAL)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1. Jumlah Permohonan yang Memenuhi Syarat yang dilayani 2. Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	210 Izin 8 Kali

ESSELON IV (KASI PROMOSI DAN INVESTASI)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengikuti Kegiatan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Jumlah Promosi Potensi Investasi Kabupaten Tanah Laut di Luar Provinsi	1 Kali
2	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kajian Potensi Hilirisasi Investasi	2. Jumlah Dokumen Kajian Potensi Hilirisasi Investasi Kabupaten Tanah Laut	2 Dok
3	Melaksanakan Fasilitasi Rapat Koordinasi IKM/UKM	3. Jumlah Forum IKM/UKM	6 Kali

ESSELON IV (KASI DATA DAN INFORMASI)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mengelola Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	1. Jumlah Laporan Data Perizinan dan Non Perizinan	1 Dok
2	Melaksanakan Penyusunan/Revisi Standar Operasional Prosedur	2. Jumlah Dokumen SOP	1 Dok
3	Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan	3. Jumlah Sosialisasi dan Penyuluhan 4. Jumlah Sosialisasi melalui Media Masa	4 Kali 4 Jenis

ESSELON IV (KASI PENGADUAN PELAYANAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pelayanan Pengaduan Masyarakat	1. Jumlah Aduan yang dilayani	132 Aduan
2	Melaksanakan Pelayanan Pemohonan Perizinan dan Non Perizinan	2. Jumlah Permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang diproses	3.082
3	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	3. Nilai IKM	80
4	Melaksanakan Peningkatan SDM	4. Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Ditingkatkan	20 Org

ESSELON IV (KASI PERIZINAN JASA USAHA)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	1. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha yang diverifikasi	2.626 Izin
		2. Jumlah Rapat yang dilaksanakan dengan Tim Teknis	10 Kali

ESSELON IV (KASI PERIZINAN TERTENTU)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Melaksanakan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	1. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Tertentu yang diverifikasi	456 Izin
		2. Jumlah Rapat yang dilaksanakan dengan Tim Teknis	10 Kali

F. Program dan Kegiatan

No.	Program dan Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
2	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi
3	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
2	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur
3	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perelengkapannya
3	Program Pengembangan Investasi Daerah
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
3	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
1	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD
2	Penyusunan laporan keuangan
3	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
5	Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Usaha
1	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha
2	Koordinasi antar Tim Tekhnis dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Usaha

6	Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Non Usaha
1	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Non Usaha
2	Koordinasi antar Tim Tekhnis dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Non Usaha
7	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
1	Penyebarluasan Informasi Pelayanan Publik
2	Penyusunan/Revisi Standar Operational Prosedur
3	Penyusunan Data dan Bahan Pelaporan Penyelenggaraan Perijinnan dan Non Perizinan
4	Survey Kepuasan Masyarakat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020. Selain itu realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2020.

1. Sasaran RPJMD

Dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu komponen SKPD yang melaksanakan Sasaran pada misi ke 1 RPJMD yaitu Berkarya Meningkatkan Kualitas SDM dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Sosial dan Budaya dan misi ke 5 RPJMD yaitu Membangun Sinergitas yang baik antar tingkat Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi	887,456	947.084	104%
2.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Lainnya	Nilai IKM	80	89,39	117,74%

- Nilai Investasi

Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dari target Rp. 887.452.000.000 realisasinya Rp. 947.084.000.000 lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu kenaikan investasi daerah 5% per tahunnya. Upaya untuk meningkatkan nilai investasi melalui promosi investasi. Berikut tabel dari realisasi investasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020:

Tabel 3.2 Realisasi Investasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020

No	Nama Usaha	Jumlah
1.	SKTU	
	• Perorangan	699
	• CV	305
	• PT	182
	• Badan Usaha Lainnya	9

- Nilai IKM

Dari keseluruhan kuesioner (150 kuesioner) dapat terisi dengan baik hingga dapat diolah dan dianalisa lebih lanjut, dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut di peroleh dari hasil pengukuran berdasarkan 10 unsur pelayanan yaitu:

1. Kesesuaian pelayanan
2. Prosedur pelayanan
3. Kecepatan pelayanan
4. Kewajaran dan kepastian biaya pelayanan
5. Ketentuan dan spesifikasi jenis pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan
7. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan
8. Kemampuan petugas pelayanan
9. Penanganan pengaduan
10. Kenyamanan dan lingkungan pelayanan

Berdasarkan pengukuran terhadap 10 kualitas unsur pelayan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 87,68 dengan angka indeks sebesar 89,39 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik karena berada dalam nilai interval konversi indeks Kepuasan Masyarakat : 81,26-100.

Tabel 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

2019	2020
87,63	89,39

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selalu berbenah untuk meningkatkan mutu dari pelayanan baik dari kejelasan prosedur, system perizinan terpadu selalu update dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan.

1. Akuntabilitas Kinerja Kepala Dinas

Akuntabilitas Kepala DPMPTSP dalam laporan ini diukur pada level pelaksanaan dan realisasi program. Demikian juga halnya dengan pengukuran akuntabilitas kinerja Sekretaris dan para Kepala Bidang. Penilaian didasarkan pada serapan anggaran masing-masing program yang kemudian dirata-ratakan untuk memudahkan pengukuran.

Kepala DPMPTSP berusaha untuk mewujudkan sasaran strategis DPMPTSP yang terdiri dari meningkatnya investasi di Kabuapten Tanah Laut dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan. Adapun sasaran strategis yang diampu oleh Kepala DPMPTSP dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	887.542.000.000,-	947.084.000.000,-	106,71%

2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	89,39	117,74%
---	---	----------------------------	----	-------	---------

Berdasarkan tabel diatas, Akuntabilitas Kinerja Kepala DPMPTSP dapat dilihat dari serapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan dari 8 Program yang dilaksanakan. Dari 8 Program tersebut terdapat 2 program yang tidak dilaksanakan yaitu program Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan yang kegiatannya memang dibatalkan akibat adanya covid-19 dan pertimbangan efisiensi untuk tidak dilaksanakan serta program pemenuhan, peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur dan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. Dengan mengabaikan 2 program yang tidak dilaksanakan ini maka apabila dirata-ratakan serapan anggaran yang berhasil dicapai adalah 89,16% dari target 100 persen yang dimuat dalam perjanjian kinerja.

Namun, apabila dilihat dari realisasi fisik kegiatan maka data realisasi fisik yang dicapai menunjukkan semua program kegiatan mencapai 95,80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target-target fisik kegiatan dapat tercapai meskipun dana yang terserap hanya berkisar 89,16%. Penyerapan anggaran yang lebih kecil dibanding realisasi fisik ini sebagian besar disebabkan oleh kondisi pandemi yang masih berlangsung di tahun 2020. Dengan kondisi pandemi yang terjadi, banyak rapat-rapat koordinasi secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan dan diganti dengan kegiatan rapat secara daring (dalam jaringan) atau secara online. Meskipun demikian, secara kinerja fisik, semua target fisik dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, terjadi efisiensi anggaran, dimana biaya yang semestinya dikeluarkan bisa tidak perlu dikeluarkan, namun hasil yang ingin dicapai tetap dapat diperoleh.

2. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Dinas

Sekretaris DPMPTSP mengampu 4 Program untuk mewujudkan sasaran Kinerja Sekretaris DPMPTSP yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD. Adapun Program-program yang diampu oleh Sekretaris DPMPTSP dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1. Persentase terkelolanya Administrasi Umum dan Kepegawaian	100%	100%	100%
		2. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan	100%	100%	100%
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	A	-	-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Sekretaris DPMPTSP mengampu 1 sasaran strategis yakni meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD dengan 3 indikator kinerja yakni persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian yang terealisasi 100%. Persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan direalisasikan 100%. Sedangkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD ditargetkan memperoleh nilai A dan sedang dalam masa menunggu hasil penilaian.

1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Menyusun Data Kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	100% DUK, Penjagaan Cuti PNS, Penjagaan Berkala, dan Penjagaan Pangkat
2.	Merencanakan dan Mengadakan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Asset terkait Sarana dan Prasarana	1 Dok	1 Dok	100% Laporan Pemeliharaan, Laporan Barang Pakai Habis, Laporan Pemanfaatan, Laporan Belanja Modal, laporan Pengamanan dan Pemeliharaan, KIR, KIB, RKBMD, dan Stock Opname
3.	Memfasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Jumlah Bimtek untuk Aparatur yang dilaksanakan	3 Org	3 Org	100% Zoom

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbag Umum dan Kepegawaian memiliki sasaran kinerja berupa menyusun data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian dengan indikator kinerja jumlah dokumen kepegawaian yang memiliki target 1 dokumen yang terdiri dari DUK, Penjagaan Cuti PNS, Penjagaan Berkala, dan Penjagaan Pangkat yang realisasinya mencapai 100%. Untuk sasaran merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran dengan indikator jumlah dokumen aset terkait sarana dan prasarana yang realisasinya berhasil mencapai target 100% dengan 1 dokumen yakni Laporan Barang Pakai Habis, Laporan Pemanfaatan, Laporan Belanja Modal, laporan Pengamanan dan Pemeliharaan, KIR, KIB, RKBMD, dan Stock Opname. Serta kinerja memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM aparatur dengan indikator kinerja jumlah Bimtek untuk

aparatur yang dilaksanakan untuk 3 orang SDM. Adanya pandemi di tahun 2020 yang mengakibatkan kegiatan ini dilaksanakan melalui kanal Zoom.

2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan

Akuntabilitas kinerja Kasubbag Perencanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja DPMPTSP	Jumlah Laporan dan Evaluasi Kinerja SKPD	3 Dok	3 Dok	100% Lakip, LKPJ, LPPD
		Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dok	2 Dok	100% Renja 2021 dan Renja Perubahan 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbag Perencanaan mengampu 2 Kegiatan yang terdiri atas 2 kegiatan untuk mencapai kinerja berupa menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Kinerja Jumlah laporan dan evaluasi kinerja SKPD dan jumlah dokumen perencanaan. Jumlah laporan dan evaluasi kinerja SKPD target 3 dokumen yaitu LAKIP, LKPJ dan LPPD dan untuk dokumen perencanaan target 3 dokumen realisasi 3 dokumen yaitu Renja 2021 dan Renja Perubahan 2020 sehingga target kegiatan tersebut 100%.

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbag Perencanaan berjumlah Rp 7.999.800,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp 6.269.000,- atau sekitar 78,36%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan

Akuntabilitas kinerja Kasubbag keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Menyusun dan Merencanakan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	37 Dok	43 Dok	116% 12 Dokumen Lap. Bendahara Penerimaan, 12 Dok Lapcapkir Kasubbag Keuangan, 18 Dok Lap. Bendahara pengeluaran, 1 CALK

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbag Keuangan mengampu 1 Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa menyusun dan merencanakan administrasi keuangan dengan indikator kinerja jumlah dokumen laporan keuangan. Jumlah dokumen laporan keuangan memiliki target 37 dokumen dan realisasinya berjumlah 43 dokumen yang terdiri dari 12 Dokumen Laporan Bendahara Penerimaan, 12 Dokumen Laporan Capaian Kinerja Kasubbag Keuangan, 18 Dokumen Laporan Bendahara Pengeluaran, dan 1 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sehingga target kegiatan tersebut 116%.

3. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perizinan Tertentu

Kepala Bidang Perizinan Tertentu mengampu 1 Program yaitu Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan untuk mewujudkan sasaran Kinerjanya yaitu meningkatkan penerbitan perizinan dan non perizinan tertentu. Terkait realisasi dari kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	Persentase Permohonan Izin yang divalidasi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	(5%) 456 Izin	592 Izin	129,82%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa presentase permohonan izin yang divalidasi perizinan dan non perizinan tertentu mempunyai target 456 izin dan realisasinya berhasil melampaui target, yakni sebanyak 592 Izin. Adapun presentase capaian kerjanya mencapai 129, 82%.

1) Akuntabilitas Kinerja Kasi Perizinan Tertentu

Akuntabilitas kinerja Kasubbid Penyusunan Program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perizinan Tertentu	1. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diverifikasi Perizinan Tertentu	456 Izin	592 Izin	129,82%
		2. Jumlah Rapat yang dilaksanakan dengan Tim Teknis	10 Kali	2 Kali	20%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasi Perizinan Tertentu mengampu 2 Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tertentu dengan indikator kinerja jumlah perizinan dan non perizinan yang diverifikasi perizinan tertentu dan jumlah rapat yang dilaksanakan dengan tim teknis. Jumlah target perizinan dan non perizinan yang diverifikasi perizinan tertentu sebanyak 456 Izin dan realisasinya sebanyak 592 Izin dengan angka capaian kinerja mencapai 129,82%. Adapun jumlah rapat yang dilaksanakan dengan tim teknis memasang target sebanyak 10 Kali

namun realisasinya hanya mencapai 2 Kali. Hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19, namun untuk mengatasi masalah tersebut rapat yang dilaksanakan melewati media online seperti zoom meeting.

4. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha

Terkait dengan capaian kinerja atau akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Persentase Permohonan Izin yang divalidasi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	(5%) 2.626 Izin	1.674 Izin	63,75%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha Tertentu mengampu 1 sasaran strategis yakni Meningkatkan penerbitan perizinan dan non perizinan jasa usaha dengan indikator kinerja persentase permohonan izin yang divalidasi perizinan dan non perizinan jasa usaha. Permohonan izin yang divalidasi perizinan dan non perizinan jasa usaha memiliki target sebesar 2.626 izin namun realisasinya hanya mencapai 1.674 izin dan capaian kinerja 63,75%. Hal ini disebabkan oleh adanya Covid-19 sehingga diharapkan pandemi segera berakhir agar tim dapat bekerja maksimal dan pelaku usaha mengalami peningkatan dalam jumlah pengajuan izin.

1) Akuntabilitas Kinerja Kasi Perizinan Jasa Usaha

Akuntabilitas Kinerja Kasi Perizinan Jasa Usaha dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha yang diverifikasi	2.626 Izin	1.674 Izin	63,75%

Bidang Jasa Usaha	2. Jumlah Rapat yang dilaksanakan dengan Tim Teknis	10 Kali	4 Kali	40%
-------------------	---	---------	--------	-----

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasi Perizinan Jasa Usaha mengampu 2 Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Usaha dengan indikator Kinerja Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha yang di verifikasi dan Jumlah Rapat yang dilaksanakan dengan Tim Teknis. Adapun permohonan izin yang divalidasi perizinan dan non perizinan jasa usaha memiliki target sebesar 2.626 izin namun realisasinya hanya mencapai 1.674 izin dan capaian kinerja 63,75%. Hal ini disebabkan oleh adanya Covid-19 sehingga diharapkan pandemi segera berakhir agar tim dapat bekerja maksimal dan pelaku usaha mengalami peningkatan dalam jumlah pengajuan izin. Sedangkan Jumlah rapat yang dilaksanakan dengan tim teknis berhasil dilaksanakan sebanyak 4 kali dari target 10 kali, sehingga didapat capaian kinerja sebesar 40%.

5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan

Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Persentase Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Turun 5% (125)	3 Aduan	Turun 97,6%
		2. Persentase Pelayananan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Naik 5% (3.082)	3.472 Izin	112,65% Naik 12,65%
		3. Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	20 Org	20 Org	100%

		4. Persentase Ketersediaan Data Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kepala Informasi dan pengaduan pelayanan perizinan mengampu 1 sasaran strategis yaitu meningkatnya efektivitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan 4 indikator kinerja seperti persentase penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditargetkan turun 5% (125 aduan) dengan realisasi 3 aduan sehingga capaian kinerja memperoleh hasil 97,6%. Indikator kinerja ke-2 adalah persentase pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan yang mencapai realisasi 3.472 izin dari target yang dipasang yakni naik 5% (3.082 izin) dengan capaian naik 12,65%. Peningkatan sumber daya aparatur berhasil direalisasikan 100% untuk 20 orang aparatur melalui kanal Zoom yang disebabkan oleh adanya pandemi sehingga tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka.

1) Akuntabilitas Kinerja Kasi Data dan Informasi

Akuntabilitas Kinerja Kasi Data dan Informasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Mengelola Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Data Perizinan	1 Dok	1 Dok	100%
2.	Melaksanakan Penyusunan/Revisi Standar Operasional Prosedur	Jumlah Dokumen SOP	1 Dok	1 Dok	100%
3.	Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan	1. Jumlah Sosialisasi dan Penyuluhan	4 Kali	0	0

		2. Jumlah Media Sosialisasi	4 Jenis	3 Jenis	75% Website, FB, dan IG
--	--	-----------------------------	---------	---------	-------------------------------

Dari tabel diatas dapat diketahui Kasi Data dan Informasi mengampu 3 sasaran strategis yang terdiri dari mengelola data dan informasi perizinan dan non perizinan yang memiliki indikator kinerja jumlah laporan data perizinan 1 dokumen yang berhasil direalisasikan 100%. Untuk melaksanakan penyusunan/revisi SOP dengan indikator kinerja jumlah dokumen SOP 1 dokumen yang berhasil direalisasikan 100%. Sementara untuk sasaran startegis melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan yang memiliki 2 indikator kinerja seperti jumlah sosialisasi dan penyuluhan yang ditargetkan dilakukan 4 kali pertemuan batal dilaksanakan disebabkan oleh Covid-19 dan tidak memungkinkan untuk alternatif Zoom disebabkan oleh kegiatan yang melibatkan peserta yang banyak sementara untuk indikator jumlah media sosialisasi berhasil direalisasikan 75% dari target yang ditentukan 4 jenis.

2) Akuntabilitas Kinerja Kasi Pengaduan Pelayanan

Akuntabilitas Kinerja Kasi Pengaduan Pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Melaksanakan Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Aduan yang dilayani	132 Aduan	3 Aduan	Turun 97,6%
2.	Melaksanakan Pelayanan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang diproses	3.082 Izin	3.472 Izin	112,65% Naik 12,65%
3.	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	80	89,39	117,74%

4.	Melaksanakan Peningkatan SDM	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan	20 Org	20 Org	100% Via Zoom
----	------------------------------	---	--------	--------	------------------

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah aduan yang dilayani turun sebanyak 97,6% dari target yang ditentukan yakni turun 5% (132 aduan). Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang diproses berhasil direalisasikan sebanyak 3.472 izin yang artinya capaian kinerja naik 12,65%. Upaya peningkatan sumber daya aparatur melalui indikator kinerja jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan sebanyak 20 orang dilaksanakan via zoom sehingga capaian kinerja mencapai 100% .

6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penanaman Modal

Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi	Jumlah Kenaikan Pelaku Investasi	6 Buah	18 Buah	300% CV. Dua Mas, PT. Cipta Karya Millenia, Nio Al Ling, PT. Semeru Surya Steel, PT. Infrastruktur Terbarukan Indonesia, Tbk, PT. Jafpa Comfeed Indonesia, Tbk., PT. Lestari Unggul Anugerah, PT. Sinar Alam Angkasa Mandiri, PT. Tarsis Murni Anugrah, PT. Ariqa Mega Utama, PT. Global Widya Sinergy, PT. Global Widya Sinergy 1, PT. Global Widya Sinergy 2, PT. Gota Mulya Banjar 1, PT. Gota Mulya Banjar 2, PT. Gota Mulya Utama, PT. Penguin Indonesia, PT. Penguin Indonesia

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Sosial Budaya mengampu 1 sasaran strategis yakni meningkatnya jumlah pelaku investasi dengan indikator kinerja jumlah kenaikan pelaku investasi yang targetnya ditentukan sebanyak 6 buah berhasil direalisasikan sebanyak 18 buah yang artinya pelaku investasi mengalami kenaikan 300% .

1) Akuntabilitas Kinerja Kasi Pengawasan dan Pengendalian

Akuntabilitas Kinerja Kasi Pengawasan dan Pengendalian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan terhadap Perusahaan	1. Jumlah Perusahaan yang dimonitoring dan dievaluasi	10 Perusahaan	10 Perusahaan	100% Arutmin, JBG, Pama, Amanah, Bridgestone, Japfa, Club, SSD, Dharma Henwa, dan SNI
		2. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	5 Dok	5 Dok	100% LKPM

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasi Pengawasan dan Pengendalian mengampu 1 sasaran strategis yaitu melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap perusahaan dengan 2 indikator kinerja yang terdiri atas jumlah perusahaan yang dimonitoring dan dievaluasi yang memiliki target 10 perusahaan (Arutmin, JBG, Pama, Amanah, Bridgestone, Japfa, Club, SSD, Dharma Henwa, dan SNI) dan capaian kinerja mencapai 100% dan untuk indikator kinerja jumlah laporan monitoring dan evaluasi berhasil mencapai target 5 dokumen yakni LKPM.

2) Akuntabilitas Kinerja Kasi Pelayanan Penanaman Modal

Akuntabilitas Kinerja Kasi Pelayanan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1. Jumlah Permohonan yang Memenuhi Syarat yang dilayani	210 izin	1.219 Izin	480,48%
		2. Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	8 Kali	18 Kali	225% Rapat Izin Lokasi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasi Penanaman Modal mengampu 1 sasaran strategis yaitu melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal untuk mencapai indikator kinerja berupa jumlah permohonan yang memenuhi syarat yang dilayani dan jumlah rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal.

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah permohonan yang memenuhi syarat yang dilayani mencapai 480,48% dari target yang ditentukan sebanyak 210 izin dapat direalisasikan sebanyak 1.219 izin. Sedangkan jumlah rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal realisasi mencapai 18 kali dari targer 8 kali sehingga didapat capaian kinerja 225%.

1) Akuntabilitas Kinerja Kasi Promosi dan investasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Mengikuti Kegiatan Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Jumlah Promosi Potensi Investasi Kabupaten Tanah Laut di Luar Provinsi	1 Kali	0	0
2.	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kajian Potensi Hilirisasi Investasi	Jumlah Dokumen Kajian Potensi Hilirisasi Investasi Kabupaten Tanah Laut	2 Dok	2 Dok	100% Dokumen Kajian Potensi

					Hilirisasi Investasi dan Video
3.	Melaksanakan Fasilitas Rapat Koordinasi IKM/UKM	Jumlah Forum IKM/UKM	6 Kali	0	0

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasi Promosi dan investasi mengampu 3 sasaran strategis yang terdiri atas mengikuti kegiatan peningkatan promosi dan kerja sama investasi dengan indikator kinerja jumlah potensi investasi Kabupaten Tanah Laut di luar provinsi sebanyak 1 kali yang batal dilaksanakan karena Covid-19, dengan adanya hambatan ini Kasi Promosi dan Investasi memaksimalkan media sosial untuk mempromosikan investasi Kabupaten Tanah Laut. Selain itu sasaran strategis melaksanakan fasilitas rapat koordinasi IKM/UKM juga batal dilaksanakan disebabkan oleh masalah yang sama yakni Covid-19. Untuk jumlah dokumen kajian potensi hilirisasi investasi Kabupaten Tanah Laut dapat direalisasikan 100% persen dengan 2 dokumen yang terdiri atas dokumen kajian potensi hilirisasi investasi dan video.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2019

Tahun 2019 DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang terdapat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp 5.827.847.111,00 yang terdiri dari :

a) Belanja Tidak Langsung

Jumlah belanja ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan, berikut tabel belanja tidak langsung tahun 2019 :

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.035.936.872,00	1.407.122.488,00	69,11%
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.729.385.700,00	1.630.258.851,00	94,27%
	Total	3.765.322.572,00	3.037.381.339,00	80,57%

a) Belanja Langsung

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2019 ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan, yang terdiri atas 11 (sebelas) program yang terdiri atas 35 (tiga puluh lima) kegiatan.

DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD tahun 2019 dengan anggaran sebesar 2.062.524.539,00 dengan program sebanyak 11 (sebelas) program yang terdiri atas 35 (tiga puluh lima) kegiatan tersebut seluruhnya telah terealisasi.

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020

a) Belanja Tidak Langsung

Jumlah belanja ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan, berikut tabel belanja tidak langsung tahun 2020 :

Tabel Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.105.983.172,00	1.495.913.996,00	71,03%
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.348.289.372,40	1.538.960.554,00	65,54%
	Total	4.454.272.544,40	3.304.874.550,00	74,20%

Total belanja tidak langsung setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 4.454.272.544,40, seluruhnya untuk belanja pegawai, yaitu berupa gaji, tunjangan dan tambahan

penghasilan. Adapun Realisasi Belanja Tidak Langsung ini adalah sebesar Rp 3.304.874.550,00 atau 68,29% dari Anggaran.

b) Belanja Langsung

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2020 ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, yang terdiri atas 8 (delapan) program yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) kegiatan

Dengan adanya Wabah Covid-19, dilakukan penyesuaian Anggaran pada Tahun 2020. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2020 total anggaran adalah sebesar Rp 6.868.642.052,00. Pada Bulan April 2020 dilakukan Perubahan Anggaran mendahului Perubahan APBD dengan Total Anggaran sebesar Rp 5.796.960.239,40. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang disahkan pada bulan Oktober 2020 Total Anggaran DPMPTSP adalah sebesar Rp 4.232.143.966,00 yang terdiri dari :

- Belanja Langsung

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2020 ini dipergunakan untuk membiayai Program-Program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan DPMPTSP, yang terdiri atas 8 (delapan) program yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) kegiatan. Berikut adalah Realisasi Belanja DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 :

Realisasi Anggaran Belanja Langsung DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2020 :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	Belanja Langsung			
1	Belanja Barang dan Jasa	1.077.027.695,00	950.179.416,00	88,22%
	Belanja Bahan Pakai Habis	115.699.700,00	87.644.600,00	75,75%
	Belanja Bahan/Material	3.392.000,00	-	-

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	Belanja Jasa Kantor	364.436.135,00	345.237.916,00	94,73%
	Belanja Premi Asuransi	15.623.460,00	14.891.446,00	95,31%
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.430.000,00	42.177.500,00	69,80%
	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.068.400,00	52.450.200,00	72,78%
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-	-	-
	Belanja Makanan dan Minuman	49.613.000,00	45.413.000,00	91,53%
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	-	-
	Belanja Perjalanan Dinas	361.790.000,00	332.339.754,00	91,86%
	Belanja Pemeliharaan	21.875.000,00	18.425.000,00	84,23%
	Belanja Jasa Konsultasi	-	-	-
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-
	Belanja Honorarium Non PNS	-	-	-
2	Belanja Modal	265.660.000,00	247.090.000,00	93,01%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.660.000,00	157.350.000,00	89,58%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	6.000.000,00	5.200.000,00	86,67%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	7.000.000,00	7.000.000,00	100%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.500.000,00	14.300.000,00	77,30%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	32.000.000,00	30.100.000,00	94,06%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	112.160.000,00	100.750.000,00	89,83%
	Belanja Modal Aset Lain-Lain	90.000.000,00	89.740.000,00	99,71%
	Jumlah	1.342.687.695,00	1.197.269.416,00	89,17%

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan DPAP-SKPD Tahun Anggaran 2020 dengan total anggaran sebesar Rp 1.342.687.695,00, terdiri dari Jumlah Program sebanyak 8 (delapan) dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Dari kegiatan tersebut ada satu kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan dengan total dana Rp 20.000.000,00. Hal ini tidak dapat direalisasikan karena masih adanya wabah Covid-19, sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak dihindari. Secara keseluruhan realisasi keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	781.600.595,00	722.734.616,00	92,47%
1.	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	307.448.000,00	278.777.754,00	90,67%
2.	Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	231.460.200,00	201.996.481,00	87,27%
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	242.692.395,00	241.960.381,00	99,70%
B.	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	248.155.000,00	207.296.500,00	83,54
1.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	248.155.000,00	207.296.500,00	83,54
2.	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	-	-	-
3.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	-

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
C.	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	90.000.000,00	69.740.000,00	77,49%
1.	Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	70.000.000,00	69.740.000,00	99,63%
2.	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	20.000.000,00	-	-
D.	Program Pengembangan Investasi Daerah	96.186.400,00	77.311.900,00	80,38%
1.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	18.290.000,00	16.535.000,00	90,40%
2.	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	26.349.500,00	25.128.200,00	95,36%
3.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	51.546.900,00	35.648.700,00	69,16%
E.	Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Usaha	20.225.000,00	20.180.000,00	99,78%
1	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	16.625.000,00	16.580.000,00	99,73%
2	Koordinasi Antar Tim Teknis dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Usaha	3.600.000,00	3.600.000,00	100%
F.	Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Non Usaha	25.457.000,00	25.160.000,00	98,83%
1	Penyelenggaraan Pelayanan	22.500.000,00	22.500.000,00	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	Perizinan dan Non Perizinan Non Usaha			
2	Koordinasi Antar Tim Teknis dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Non Usaha	2.957.000,00	2.660.000,00	89,96%
G.	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	67.064.300,00	63.328.400,00	94,43%
1	Penyebarluasan Informasi Pelayanan Publik	39.347.700,00	39.022.700,00	99,17%
2	Penyusunan/Revisi Standar Operasional Prosedur	11.549.800,00	9.377.500,00	81,19%
3	Penyusunan Data dan Bahan Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	6.167.000,00	5.865.900,00	95,12%
4	Survey Kepuasan Masyarakat	9.999.800,00	9.062.300,00	90,62%
H.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	13.999.400,00	11.518.000,00	82,27%
1	Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	3.999.900,00	3.179.000,00	79,48%
2	Penyusunan Laporan Keuangan	5.999.600,00	5.249.000,00	87,49%
3	Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja	3.999.900,00	3.090.000,00	77,25%
	Jumlah	1.342.687.695,00	1.197.269.416,00	89,17%

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020

Berikut akan digambarkan perbandingan antara kegiatan-kegiatan yang ada di tahun 2019 dan Tahun 2020. Perbandingan yang dilakukan tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara paralel program dan kegiatan karena ada sebagian program atau kegiatan yang ada di tahun 2019 tetapi tidak ada di tahun 2020. Demikian pula sebaliknya, ada program kegiatan yang ada di tahun 2020 tetapi tidak ada di tahun 2019. Terdapat pula perubahan nama program yang diakibatkan numenklatur yang berbeda disebabkan aturan yang digunakan di tahun 2019 adalah numenklatur berdasarkan Permendagri Nomor 13

Untuk melihat perbandingan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Program / Kegiatan		Anggaran (Pagu)		Realisasi (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
A	Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.243.260.089,-	761.600.595,-	90,22	92,47
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	114.000.000,-	231.460.200,-	87,13	87,27
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan		6.800.000,-		18,09	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor		6.747.600,-		96,79	
4	Penyediaan alat tulis kantor		47.126.800,-		99,02	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		59.160.000,-		78,06	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		5.810.100,-		81,32	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		8.080.000,-		31,19	
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.487.000,-		18,09	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan rapat-	22.679.500,-	307.448.000,-	98,06	90,67

No.	Program / Kegiatan		Anggaran (Pagu)		Realisasi (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	rapat, konsultasi, dan koordinasi	408.750.000,-		99,83	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		75.000.000,-		76,25	
12	Penyedia jasa penunjang kinerja SKPD	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	223.789.089,-	242.692.395,-	95,30	99,70
B	Program peningkatan sarana dan prasana aparatur	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	49.500.000,-	248.155.000,-	98,45	83,54
1	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	95.500.000,-	248.155.000,-	74,46	83,54
2	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		22.750.000,-		41,17	
3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		36.000.000,-		98,47	
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		13.500.000,-		98,57	
5.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	NA	144.580.000,-	NA	91,88	NA
6	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	152.790.000,-	0	000	0
7	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		160.000.000,-		000	
8	NA	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	NA	0	NA	0
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	10.799.400,-	13.999.400,-	78,50	82,27

No.	Program / Kegiatan		Anggaran (Pagu)		Realisasi (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan keuangan	6.299.600,-	5.999.900,-	85,83	87,49
2	Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	4.499.800,-	3.999.900,-	68,22	77,25
3	NA	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	NA	3.999.900,-	NA	79,48
D	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	14.998.100,-	90.000.000,-	94,82	77,49
1	Pengembangan sistem pelayanan dan inovasi pelayanan perijinan dan non perijinan	Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	50.000.000,-	70.000.000,-	99,55	99,63
2	Penyelenggaraan pameran investasi	Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan	14.998.100,-	20.000.000,-	94,82	0
E	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Pengembangan Investasi Daerah	44.454.100,-	96.186.400,-	89,19	80,38
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.229.500,-	18.290.000,-	74,29	90,40
2	Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal	Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal	29.224.600,-	26.349.500,-	96,95	95,36
3	NA	Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi	NA	51.546.900,-	NA	69,16
F	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	NA	125.982.200,-	NA	97,28	NA
1	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	NA	125.982.200,-	NA	97,28	NA

No.	Program / Kegiatan		Anggaran (Pagu)		Realisasi (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
G	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Program Peningkatan Perijinan dan Non Perijinan	164.449.400,-	67.064.300,-	76,06	94,43
1	Penyusunan/revisi standar operasional prosedur	Penyusunan/revisi standar operasional prosedur	54.000.000,-	11.549.800,-	65,00	81,19
2	Penyusunan data dan bahan pelaporan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan	Penyusunan data dan bahan pelaporan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan	17.999.700,-	6.167.000,-	91,43	95,12
3	Penyebarluasan informasi pelayanan public	Penyebarluasan informasi pelayanan publik	35.700.000,-	39.347.700,-	49,78	99,17
4	Survey kepuasan masyarakat	Survey kepuasan masyarakat	6.749.700,-	9.999.800,-	88,53	90,62
H	Program Peningkatan Realisasi Perijinan dan Non Perijinan Pelaku Jenis Usaha	Program Peningkatan Realisasi Perijinan dan Non Perijinan Pelaku Jenis Usaha	45.000.000,-	20.225.000,-	73,08	99,78
1	Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan jenis usaha	Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan jenis usaha	45.000.000,-	16.625.000,-	73,08	99,73
2	Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan jenis usaha	Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan jenis usaha	0	3.600.000,-	0	100,00
I	Program Peningkatan Realiasi Pelaku Perijinan dan Non Perijinan Jenis Non Usaha	Program Peningkatan Realiasi Pelaku Perijinan dan Non Perijinan Jenis Non Usaha	44.991.750,-	25.457.000,-	87	98,83
1	Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan jenis non usaha	Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan jenis non usaha	44.099.250,-	22.500.000,-	87,89	100,00
2	Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan jenis non usaha	Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan jenis non usaha	902.500,-	2.957.000,-	91,52	89,96

Dari tabel diatas dapat diketahui :

- 1) Program Pelayanan Jasa Administrasi (2019) dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2020).

Program ini isinya relatif sama, hanya berbeda numenklatur program dan kegiatannya saja. Di tahun 2020, terdapat penyederhanaan nama kegiatan dengan nama kegiatan Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran. Satu kegiatan ini merangkum 8 kegiatan yang ada di tahun 2019 yaitu (1) kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; (2) Penyediaan jasa administrasi keuangan; (3) Penyediaan jasa kebersihan kantor; (4) Penyediaan alat tulis kantor; (5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; (6) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor; (7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (8) Penyediaan jasa surat menyurat; Rerata dari serapan 8 kegiatan yang ada di tahun 2019 menunjukkan hasil serapan sebesar 73,47%, sedangkan di tahun 2020 tercapai 92,47%. Terlihat bahwa pencapaian di tahun 2020 tercapai dengan lebih baik. Selain pada kegiatan Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran (2020), terdapat kegiatan lain yang merangkum beberapa kegiatan yang ada di tahun 2019 yaitu kegiatan Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi yang merangkum kegiatan 2019 yaitu : (1) Penyediaan makanan dan minuman; (2) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; (3) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Rerata dari serapan 3 kegiatan yang ada di tahun 2019 tersebut menunjukkan hasil serapan sebesar 91,38%, sedangkan di tahun 2020 tercapai 90,67%. Terlihat bahwa terjadi penurunan pencapaian di tahun 2020. Adapun kegiatan yang numenklaturnya hampir sama di tahun 2019 dan 2020 adalah kegiatan Penyedia jasa penunjang kinerja SKPD (2019) dan Kegiatan Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD (2020). Dilihat dari sisi serapan, serapan di tahun 2020 terlihat lebih baik yaitu 99,70% dibanding serapan di tahun 2019 yang hanya mencapai 95,30%.

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi anggaran pada pada level program, realisasi di Tahun 2019 mencapai 90,22% sedangkan pada tahun 2020 realisasi mencapai 92,47%. Dari perbandingan ini dapat dikatakan

bahwa capaian realisasi anggaran di tahun 2020 tercapai lebih tinggi. Belum lagi jika dilihat dari pagu anggaran yang lebih sedikit di tahun 2020 dibanding dengan tahun 2019. Kedua kondisi ini menunjukkan anggaran di tahun 2020 teranggarkan dan terserap secara lebih efisien.

2) Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur (2019) dan **Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia (2020).**

Tabel menunjukkan bahwa di level program, dari sisi serapan anggaran di tahun 2020 mencapai 98,45%, serapan ini lebih baik dari pelaksanaan di tahun 2019 yang hanya mencapai 83,54%. Jika dilihat secara lebih mendalam maka serapan di tahun 2020 mengalami penurunan pencapaian. Pada tahun 2020 juga terdapat perangkuman kegiatan tahun 2019 dari 4 kegiatan menjadi 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (2020) yang merangkum kegiatan (1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan (2) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (3) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. Pada program ini terdapat pengurangan kegiatan yaitu Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor (2019) yang tidak lagi dianggarkan di tahun berikutnya (2020). Terjadi perangkuman kegiatan tahun 2019 dari 2 kegiatan menjadi 1 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan kemampuan teknis aparatur (2020) yang merangkum kegiatan (1) Sosialisasi peraturan perundangan-undangan dan (2) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Selain itu adanya nomenklatur kegiatan baru pada tahun 2020 yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang sebelumnya tidak ada di tahun 2019.

3) Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (2019) dan **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD (2020).**

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (2019) terealisasi sebesar 78,50%. Pada tahun 2020, kegiatan ini berubah

numenklatur menjadi kegiatan Penyusunan Laporan keuangan yang terealisasi sebesar 87,49%. Kegiatan Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP (2019) terealisasi 68,22% berubah nomenklatur menjadi Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja (2020) yang terealisasi sebesar 77,25%. Untuk tahun 2020 muncul nomenklatur kegiatan yang baru yaitu Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD yang terealisasi 79,80% yang ditahun 2019 nomenklatur tersebut tidak ada.

4) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (2019) dan **Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD (2020).**

Pada tahun 2019, kegiatan Pengembangan sistem pelayanan dan inovasi pelayanan perijinan dan non perijinan terealisasi sebesar 94,82 % dan berubah nomenklatur menjadi Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD (2020) dengan realisasi sebesar 77,49%. Jika dilihat angka tersebut mengalami penurunan, akan tetapi hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah anggaran dari tahun sebelumnya.

Selain itu pada program ini juga terdapat Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi (2019) yang berubah nomenklatur menjadi Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan (2020). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2019 kegiatan penyelenggaraan pameran investasi terealisasi sebesar 94,82% sedangkan di tahun 2020 tidak direalisasikan. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 sehingga Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan ditiadakan yang mengakibatkan tidak terserapnya anggaran kegiatan pameran pembangunan.

5) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (2019) dan **Program Pengembangan Investasi Daerah (2020).**

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada program ini terdapat 2 Kegiatan dengan nomenklatur tetap (tidak berubah). Pada kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pada tahun 2019 terealisasi sebesar 74,29% dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 dengan realisasi 90,40%. Pada kegiatan Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal pada tahun 2019 terealisasi sebesar 96,95% dan

mengalami sedikit penurunan realisasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 95,36%.

Pada program ini terdapat 1 kegiatan baru yang belum pernah ada sebelumnya (2019) yaitu Kegiatan Peningkatan promosi dan kerjasama investasi (2020) dengan realisasi sebesar 69,16%.

6) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah (2019)

Program ini hanya ada pada tahun 2019, dan ditiadakan pada tahun 2020. Program ini mempunyai 1 kegiatan yaitu Kegiatan Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi (2019) yang tidak lagi dilaksanakan pada tahun 2020. Jumlah anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 125.982.200,- dengan persentase realisasi sebesar 97,28%.

7) Program Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (2019) dan Program Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (2020).

Program ini tidak mengalami perubahan nomenklatur baik nama program maupun nama kegiatan. Program ini memiliki 4 kegiatan diantaranya:

- a. Penyusunan/revisi standar operasional prosedur dengan realisasi sebesar 65% (2019) dan 81,19% (2020).
- b. Penyusunan data dan bahan pelaporan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan. Kegiatan ini terealisasi pada tahun 2019 terealisasi sebesar 91,43% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 95,12%.
- c. Kegiatan Penyebarluasan informasi publik, dimana pada tahun 2019 terealisasi sebesar 49,78% dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 persentase realisasi sebesar 99,17%.
- d. Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat yang terealisasi sebesar 88,53% pada tahun 2019 dan sebesar 90,62% pada tahun 2020

8) Program Peningkatan Realisasi Perijinan dan Non Perijinan Pelaku Jenis Usaha (2019) dan Program Peningkatan Realisasi Perijinan dan Non Perijinan Pelaku Jenis Usaha (2020).

Program ini pun tidak mengalami perubahan nomenklatur. Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non

perijinan jenis usaha, dimana tahun 2019 terealisasi sebesar 73,08% dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 99,73%.

Selain kegiatan tersebut pada program ini juga terdapat kegiatan Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan jenis usaha. Kegiatan ini pada tahun 2019 tidak dianggarkan. Tetapi pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 3.600.000,00 dengan tingkat realisasi 100%.

9) Program Peningkatan Realisasi Pelaku Perijinan dan Non Perijinan Jenis Non Usaha (2019) dan Program Peningkatan Realisasi Pelaku Perijinan dan Non Perijinan Jenis Non Usaha (2020).

Dari tabel di atas kita dapat mengamati bahwa tidak terjadi perubahan nomenklatur bari program maupun kegiatan. Program ini dilaksanakan dengan dengan dukungan 2 kegiatan. Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan jenis non usaha pada tahun 2019 terealisasi sebesar 87% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu dengan tingkat realisasi sebesar 98,83%. Kegiatan Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan jenis non usaha pada tahun 2019 terealisasi sebesar 91,52% akan tetapi kegiatan ini mengalami penurunan realisasi pada tahun 2020 dengan tingkat realisasi sebesar 89,96%.

Data Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
Tahun 2020 terhadap Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
	2020			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.105.983.172,00	1.495.913.996,00	71,03%
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.348.289.372,40	1.538.960.554,00	65,54%
	Total	4.454.272.544,40	3.304.874.550,00	74,20%
	2019			
1	Belanja Gaji dan tunjangan	2.035.936.872,00	1.407.122.488,00	69,11%
2	Belanja Tambahan	1.729.385.700,00	1.630.258.851,00	94,27%

	Penghasilan PNS			
	Total	3.765.322.572,00	3.037.381.339,00	80,57%

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah Program	11	8
2	Jumlah Kegiatan	35	22
3	Jumlah Anggaran	Rp 2.062.524.539,00	Rp 1.342.687.695,00
4	Realisasi Anggaran	Rp 1.839.858.076,00	Rp 1.197.269.416,00
5	% Realisasi Anggaran	89,20%	89,17%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada Bab-Bab dari Laporan Kinerja ini diketahui bahwa :

1. Pada Anggaran Murni tahun 2020, DPMPTSP mengelola Anggaran sebesar Rp 6.868.642.052,- yang kemudian mengalami refocusing disebabkan adanya pandemi covid-19 menurun menjadi Rp 5.558.740.244,-. Anggaran tersebut kemudian terkoreksi kembali meningkat pada APBD Perubahan 2020 menjadi menjadi Rp 5.796.960.239,40.
2. Belanja Langsung DPMPTSP pada Anggaran Murni 2020 sebesar Rp 2.216.385.150,- yang kemudian direfocusing menurun menjadi Rp 1.104.467.700,- . Anggaran ini terkoreksi lagi meningkat menjadi Rp 1.342.687.695,- pada APBD 2020 Perubahan.
3. Belanja Tidak Langsung DPMPTSP pada Anggaran Murni sebesar Rp 4.652.256.902,- Pada saat terjadi refocusing menurun menjadi Rp 4.454.272.544,40. Anggaran ini tetap bertahan pada APBD 2020 Perubahan.
4. Pada laporan kinerja tahun 2020 ini penyampaian kinerja disampaikan dari level eselon II, Eselon III, hingga level eselon IV sehingga penggambaran akuntabilitas kinerja diharapkan dapat tergambar secara lebih jelas per individu pejabatnya sebagai wujud pencapaian Perjanjian Kinerja tiap individu.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan penelaahan terhadap kinerja SKPD yang diuraikan diatas dapat disampaikan beberapa strategi peningkatan Kinerja pada DPMPTSP Tanah Laut yaitu :

1. Penyusunan anggaran yang lebih efisien dan efektif, penyusunan anggaran harus lebih hemat dan menghindari penyusunan anggaran pada zona nyaman dan cenderung sama dan rutin setiap tahun.

2. Pandemi Covid-19 sepertinya masih akan berlanjut di tahun 2021 sehingga SKPD harus bersiap melakukan penyesuaian apabila akan ada refocusing anggaran jilid II. Penghematan harus dilakukan pada level perencanaan, menghitung keperluan minimal dan menyerap anggaran secara maksimal.
3. Meningkatkan kualitas jaringan untuk mengoptimalkan pelayanan sesuai Standar Operational Prosedur (SOP)
4. Mengingat pelayanan perizinan yang dihasilkan sangat tergantung dengan kualitas SDM maka kualitas SDM ini harus terus dilakukan. Perlu dilakukan bimtek kepada Tim Teknis dan seluruh ASN di Lingkup DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut.

-o0o-



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. JOKO WURYANTO, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUKAMTA
Jabatan : Bupati Tanah Laut

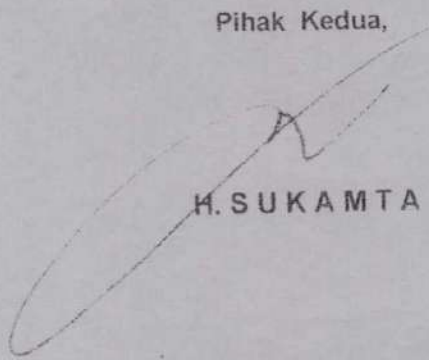
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

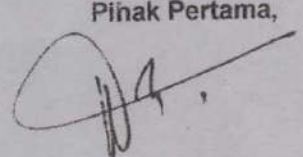
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 28 Januari 2020

Pihak Kedua,


H. SUKAMTA

Pihak Pertama,


Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP 1965011161992031008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.1.1	* Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	* Tingkat Investasi Daerah	887,542,000,000
2.1.1	* Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan	* Indek kepuasan masyarakat	80

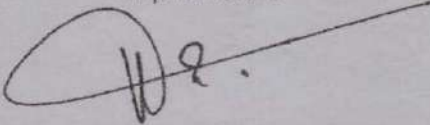
Program	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,	1 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	464,038,300.00	APBD
	2 Penyediaan Jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	221,410,200.00	APBD
	3 Penyediaan Jasa Penunjang SKPD	228,062,400.00	APBD
2. Program Pemenuhan, Peningkatan Saprasi/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	257,790,000.00	APBD
	2 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	65,000,000.00	APBD
	3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	13,800,000.00	APBD
3. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	1. Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	100,000,000.00	APBD
	2. Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	24,992,000.00	APBD
4. Program Pengembangan Investasi Daerah	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	89,970,000.00	APBD
	2. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	68,254,900.00	APBD
	3. Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	423,001,900.00	APBD
5. Program Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja SKPD	1. Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	3,999,900.00	APBD
	2. Penyusunan Laporan Keuangan	5,999,600.00	APBD
	3. Pengendalian, Evaluasi dan Laporan Kinerja	3,999,900.00	APBD
6. Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Usaha	1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	40,000,000.00	APBD
	2. Koordinasi antar Tim Teknis dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Usaha.	9,900,000.00	APBD
7. Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan	1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	39,999,900.00	APBD

Non PerizinanPelaku	Jasa Non Usaha		
Jenis Non Usaha	2. Koordinasi antar Tim Teknis dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Non Usaha.	9,999,800.00	APBD
3 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Penyebarluasan Informasi Pelayanan Publik	108,999,750.00	APBD
	2. Penyusunan/Revisi Standar Operasional Prosedur	14,999,800.00	APBD
	3. Penyusunan Data dan Bahan Laporan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	9,667,000.00	APBD
	4. Survey Kepuasan Masyarakat.	12,499,800.00	APBD

Bupati Tanah Laut,

(H. S U K A M T A)

Pelaihari, 28 Januari 2020
Pimpinan SKPD


DRS. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 1965011161992031008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. AMINAH
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 1965011161992031008

Pelaihari, Maret 2020
Sekretaris,

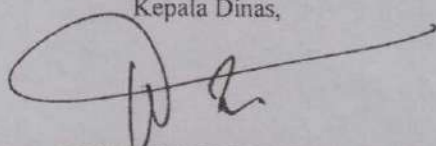
Dra. Hj. AMINAH
NIP. 196312231990032006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	1. Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian 2. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun Sesuai dengan Ketentuan 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	100% 100% 80

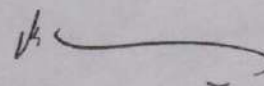
No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	1. Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	3.999.900,- 5.999.600,- 3.999.900,-
2.1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Rapat – Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 2. Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	464.038.300,- 221.410.200,- 228.062.400,-
2.2	Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumberdaya Manusia	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur 3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	257.790.000,- 15.000.000,- 13.800.000,-
2.3	Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	1. Pembuatan dan pemeliharaan system informasi SKPD 2. Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	100.000.000,- 24.992.000,-

Kepala Dinas,



Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
 NIP 1965011161992031008

Pelaihari, Maret 2020
 Sekretaris,



Dra. Hj. AMINAH
 NIP. 196312231990032006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KASNU, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dra. Hj. AMINAH
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris,

Pelaihari, Maret 2020
Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan,


Dra. Hj. AMINAH
NIP. 196312231990032006

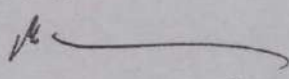

KASNU, S.Sos
NIP.196806221990021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Jumlah Laporan dan evaluasi Kinerja SKPD 2. Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dok 2 Dok

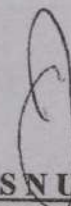
No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	1. Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	3.999.900,-
2.		2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	3.999.900,-

Sekretaris,



Dra. Hj. AMINAH
 NIP. 196312231990032006

Pelaihari, Maret 2020
 Kasubbag Program dan Pelaporan,



KASNU, S.Sos
 NIP.196806221990021001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dra. Hj. AMINAH
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris,

Dra. Hj. AMINAH
NIP. 196312231990032006

Pelaihari, Maret 2020
Kasubbag Keuangan,

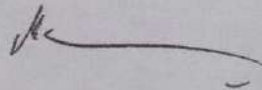
Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
NIP. 196605141994012001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menyusun, Merencanakan dan Administrasi Keuangan	1. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	37 Dok

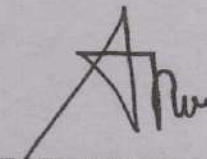
No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	1. Penyusunan laporan Keuangan	5.999.600,-

Sekretaris,



Dra. Hj. AMINAH
NIP. 196312231990032006

Pelaihari, Maret 2020
Kasubbag Keuangan



Hj. ANI SURTINAH, S.Sos
NIP.196605141994012001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BARMİYANTI, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dra. Hj. AMINAH
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris,

Dra. Hj. AMINAH
NIP. 196312231990032006

Pelaihari, Maret 2020
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

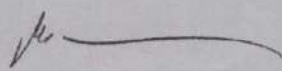
BARMİYATI, S.Sos
NIP.196403121986032017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menyusun data kepegawaian, evaluasi serta administrasi kepegawaian	1. Jumlah dokumen kepegawaian yang dilayani secara tertib	1 Dok
2	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	1. Jumlah dokumen asset terkait sarana dan prasarana	1 Dok
3	Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM aparatur	1. Jumlah Bimtek untuk aparatur yang dilaksanakan	3 Orang

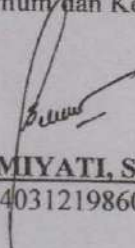
No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi 2. Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	464.038.300,- 221.410.200,- 228.062.400,-
2.	Pemenuhan, peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia	1. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 2. Peningkatan kemampuan teknis aparatur 3. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	257.790.000,- 15.000.000,- 13.800.000,-
3.	Penyebarluasan informasi pembangunan dan pelayanan SKPD	1. Pembuatan dan pemeliharaan system informasi SKPD 2. Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan	100.000.000,- 24.992.000,-

Sekretaris,



Dra. Hj. AMINAH
 NIP. 196312231990032006

Pelaihari, Maret 2020
 Kasubbag Umum dan Kepegawaian,



BARMİYATI, S.Sos
 NIP.196403121986032017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA WARDHANA, SSTP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP 1965011161992031008

Pelaihari, Maret 2020
Kepala Bidang Penanaman Modal

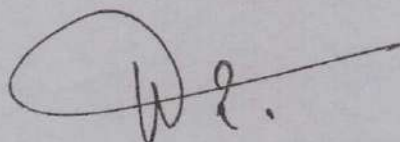
INDRA WARDHANA, SSTP
NIP. 198311062002121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi	1. Jumlah kenaikan Pelaku Investasi	6 bh

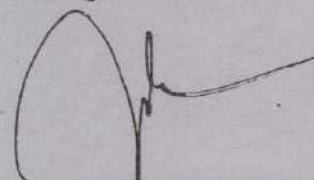
No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengembangan Investasi Daerah	1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	423.001.900,- 89.970.000,- 68.254.900,-

Kepala Dinas,



Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
 NIP 1965011161992031008

Pelaihari, Maret 2020
 Kepala Bidang Penanaman Modal,



INDRA WARDHANA, SSTP
 NIP. 198311062002121001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERNA FITRIANI, S.Sos
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : INDRA WARDHANA, SSTP,
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Maret 2020

Kepala Bidang Penanaman Modal

INDRA WARDHANA, SSTP
NIP. 198311062002121001

Kepala Seksi
Pengawasan dan Pengendalian

ERNA FITRIANI, S.Sos
NIP. 197012032006042007

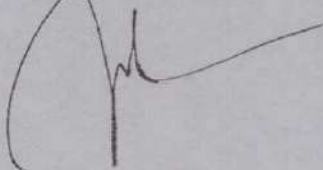
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Melaksanakan Monitoring dan Pengawasan terhadap perusahaan	1. Jumlah Perusahaan yang dimonitoring dan dievaluasi 2. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	10 Perusahaan 5 dok

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengembangan Investasi Daerah	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	89.970.000,-

Pelaihari, Maret 2020

Kepala Bidang Penanaman Modal,



INDRA WARDHANA, SSTP
NIP. 198311062002121001

Kepala Seksi
Pengawasan dan Pengendalian



ERNA FITRIANI, S.Sos
NIP. 197012032006042007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUSTI NOOR INDAH ASTUTI,SE
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : INDRA WARDHANA, SSTP,
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Maret 2020

Kepala Bidang Penanaman Modal

INDRA WARDHANA, SSTP
NIP. 198311062002121001

Kepala Seksi
Pelayanan Penanaman Modal

GUSTI NOOR INDAH ASTUTI, SE
NIP. 19740312 2010012001

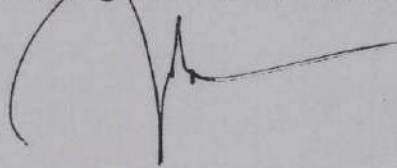
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1. Jumlah Permohonan yang memenuhi syarat yang dilayani 2. Jumlah rapat koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	210 Izin 8 Kali

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengembangan Investasi Daerah	1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	68.254.900,-

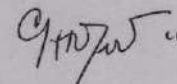
Pelaihari, Maret 2020

Kepala Bidang Penanaman Modal,



INDRA WARDHANA, SSTP
NIP. 198311062002121001

Kepala Seksi
Pelayanan Penanaman Modal



GUSTI NOOR INDAH ASTUTI, SE
NIP. 19740312 2010012001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD RIADI, S. Kom
Jabatan : KEPALA SEKSI PROMOSI INVESTASI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : INDRA WARDHANA, SSTP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Maret 2020

Kepala Bidang Penanaman Modal

INDRA WARDHANA, SSTP
NIP. 198311062002121001

Kepala Seksi
Promosi Investasi

AKHMAD RIADI, S. Kom
NIP. 198309012010011016

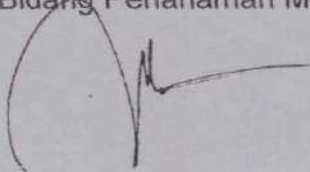
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mengikuti Kegiatan Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	1. Jumlah Promosi Potensi Investasi Kabupaten Tanah Laut diluar Provinsi	1 Kali
2	Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kajian Potensi Hilirisasi Investasi	2. Jumlah Dokumen Kajian Potensi Hilirisasi Investasi Kabupaten Tanah Laut	2 Dok
3	Melaksanakan Fasilitasi Rapat Koordinasi IKM/UKM	3. Jumlah Forum IKM/UKM	6 Kali

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengembangan Investasi Daerah	1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	423.001.900,-

Pelaihari, Maret 2020

Kepala Bidang Penanaman Modal,



INDRA WARDHANA, SSTP
NIP. 198311062002121001

Kepala Seksi
Promosi Investasi



AKHMAD RIADI, S.Kom
NIP. 198309012010011016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DANITA PUSPAWARDANI, SSTP, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI DAN PENGADUAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,

Drs, JOKO WURYANTO, M.Si
NIP 1965011161992031008

Pelaihari, Maret 2020
Kepala Bidang Data, Informasi
Dan Pengaduan

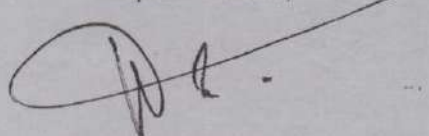
DANITA PUSPAWARDANI, SSTP, M.Si
NIP. 19820822000122003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Persentasi Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2. Persentasi Pelayanan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan 3. Persentasi Peningkatan Sumberdaya Aparatur 4. Persentasi Ketersediaan Data Perizinan dan Non Perizinan	Turun 5 % (125) 3.082 naik 5% 20 Org 100%

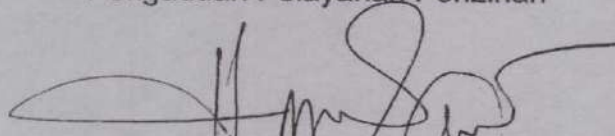
No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Penyusunan/revisi standart Operasional Prosedur 2. Penyusunan Data dan Bahan Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan 3. Penyebarluasan Informasi Pelayanan Publik 4. Survey Kepuasan Masyarakat	14.999.800,- 9.667.000,- 108.999.750,- 12.499.800,-
2.	Pemenuhan, peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas Sumberdaya Manusia	1. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	50.000.000,-

Kepala Dinas,



Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 1965011161992031008

Pelaihari, Maret 2020
Kepala Bidang Informasi dan
Pengaduan Pelayanan Perizinan



DANITA PUSPAWARDANI, SSTP, M.Si
NIP. 19820822000122003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRHAM, S.AP
Jabatan : KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DANITA PUSPAWARDANI, SSTP, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI DAN PENGADUAN

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bidang Data Informasi
Dan Pengaduan

DANITA PUSPAWARDANI, SSTP, M.Si
NIP. 19820822000122003

Pelaihari, Maret 2020
Kepala Seksi
Data dan Informasi

IRHAM, S.AP
NIP. 196608101990021002

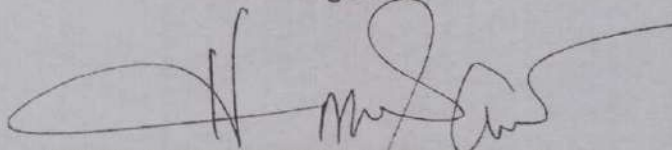
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Mengelola data dan informasi perizinan dan non perizinan	1. Jumlah Laporan Data Perizinan dan Non Perizinan	1 Dok
2.	Melaksanakan penyusunan/ revisi Standar Operasional Prosedur	2. Jumlah Dokumen SOP	1 Dok
3.	Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan	3. Jumlah Sosialisasi dan Penyuluhan	4 Kali
		4. Jumlah Media Sosialisasi	4 Jenis

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Penyusunan/revisi standart Operasional Prosedur	14.999.800,-
		2. Penyusunan Data dan Bahan Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	9.667.000,-
		3. Penyebarluasan Informasi Pelayanan Publik	108.999.750,-

Pelaihari, Maret 2020

Kepala Bidang Data, Informasi
Dan Pengaduan



DANITA PUSPAWARDANI, SSTP, M.Si
NIP. 19820822000122003

Kepala Seksi
Data dan Informasi



I R H A M, S.AP
NIP. 196608101990021002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURNIATI, S.Pi
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGADUAN PELAYANAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DANITA PUSPAWARDANI, SSTP, M.Si
Jabatan : KEPALA BIDANG DATA, INFORMASI DAN PENGADUAN

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

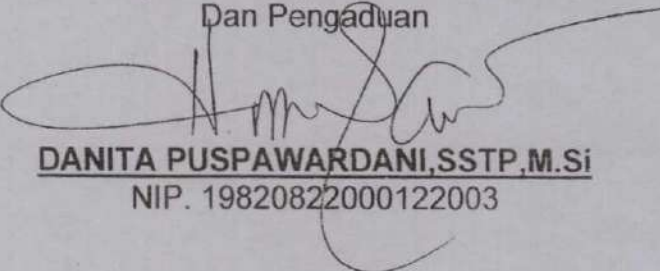
Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

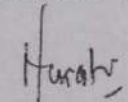
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Maret 2020

Kepala Bidang Data Informasi
Dan Pengaduan


DANITA PUSPAWARDANI, SSTP, M.Si
NIP. 19820822000122003

Kepala Seksi
Pengaduan Pelayanan


NURNIATI, S.Pi
NIP. 197107021999032010

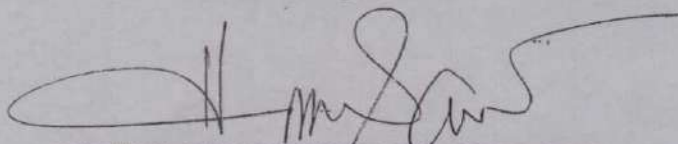
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Melaksanakan Pelayanan Pengaduan Masyarakat	1. Jumlah aduan yang dilayani	132 aduan
2.	Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2. Jumlah Permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang di proses	3.082
3.	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	3. NilailKM	80
4.	Melaksanakan Peningkatan SDM	4. Jumlah Sumberdaya Aparatur yang ditingkatkan	20 org

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Survey Kepuasan Masyarakat	12.499.800,-
2.	Pemenuhan, Peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumberdaya manusia	2. Peningkatan kemampuan teknis aparatur	50.000.000,-

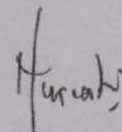
Pelaihari, Maret 2020

Kepala Bidang Data Informasi
Dan Pengaduan



DANITA PUSPAWARDANI, SSTP, M.Si
NIP. 19820822000122003

Kepala Seksi
Pengaduan Pelayanan



NURNIATI, S.Pi
NIP. 197107021999032010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. SURIANSYAH, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 1965011161992031008

Pelaihari, Maret 2020
Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha,

H. SURIANSYAH, S.Sos.
NIP. 196703061992031006

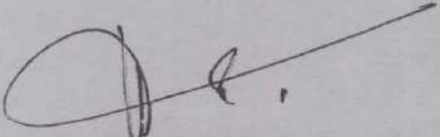
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT**

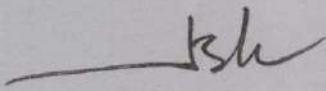
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	1. Persentase Permohonan Izin Yang Divalidasi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	(5%) 2.626 Izin

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Peningkatan Realisasi Perzinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Usaha	1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha 2. Koordinasi antar Tim Teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis usaha,	40.000.000,- 9.900.000,-

Kepala Dinas,

Pelaihari, Maret 2020
Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha,


Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 1965011161992031008


H. SURIANSYAH.S.Sos.
NIP. 196703061992031006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARTUTI, S.Sos
Jabatan : KEPALA SEKSI PERIZINAN JASA USAHA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. SURIANSYAH, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha,

H. SURIANSYAH.S.Sos.
NIP. 196703061992031006

Pelaihari, Maret 2020
Kasi Perizinan Jasa Usaha,

HARTUTI.S.Sos.
NIP. 196406011987032012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Jasa Usaha	1. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha Yang Diverifikasi 2. Jumlah rapat yang dilaksanakan dengan tim teknis	2.626 Izin 10 Kali

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Peningkatan Realisasi Perzinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Usaha	1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Usaha 2. Koordinasi antar Tim Teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	40.000.000,- 9.900.000,-

Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha,

Pelaihari, Maret 2020
Kasi Perizinan Jasa Usaha,

H. SURIANSYAH.S.Sos.
NIP. 196703061992031006

HARTUTI.S.Sos.
NIP. 196406011987032012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos,
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN TERTENTU

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas,

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 1965011161992031008

Pelaihari, Maret 2020
Kepala Bidang Perizinan Tertentu,

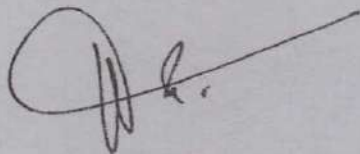
BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos,
NIP. 197602182007011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu	1. Persentase Permohonan Izin Yang di Validasi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu.	(5%) 456 Izin

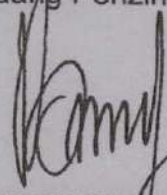
No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Non Usaha	1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Non Usaha 2. Koordinasi antar Tim Teknis dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Non Usaha	39.999.900,- 9.999.800,-

Kepala Dinas,



Drs, JOKO WURYANTO, M.Si
NIP 1965011161992031008

Pelaihari, Maret 2020
 Kepala Bidang Perizinan Tertentu,



BUDI ANDRIAN SUTANTO.S.Sos.
NIP. 197602182007011006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKHWANSYAH, SP
Jabatan : KEPALA SEKSI PERIZINAN TERTENTU

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN TERTENTU

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bidang Perizinan Tertentu,

BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos
NIP. 197602182007011006

Pelaihari, Maret 2020
Kasi Perizinan Tertentu,

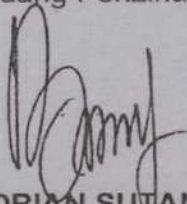
IKHWANSYAH, SP
NIP. 19760716201101002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perizinan Tertentu	1. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan perizinan Yang Diverivikasi Perizinan Tertentu 2. Jumlah rapat yang dilaksanakan dengan tim teknis	456 Izin 10 Kali

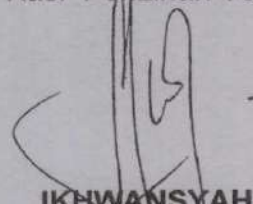
No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Peningkatan Realisasi Perzinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Non Usaha	1. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Non Usaha 2. Koordinasi antar Tim Teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Jenis Non Usaha	39.999.900,- 9.999.800,-

Kepala Bidang Perizinan Tertentu,



BUDI ANDRIAN SUTANTO, S.Sos
NIP. 197602182007011006

Pelaihari, Maret 2020
Kasi Perizinan Tertentu,



IKHWANSYAH, SP
NIP. 19760716201101002

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten

Nama SKPD

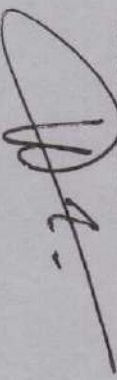
Tugas

Fungsi

- : Tanah Laut
- : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
- : a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pembinaan UPT Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penganggungjawab/sumber data
1.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	1 Tingkat Investasi Daerah	$\frac{\sum \text{Investasi tahun } n}{\sum \text{Target tahun } n} \times 100\%$ Prosentase meningkatnya Investasi 5% Per Tahun	Bidang Penanaman Modal
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	2 Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Hasil Survey 80 (delapan puluh) / Baik	Bidang Data, Informasi dan dan Pengaduan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TANAH LAUT


Drs. JOKO WURYANTO, M.Si

19650116 199203 1 008

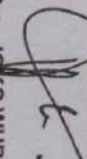
LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TRIWULAN I

PROGRAM /KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2020 (Rp.)	REALISASI		KEUANGAN	%	PERMASALAHAN / KENDALA
				FISIKI/ KINERJA	%			
3	4	5	6	7	8=(7/5)	9	10=(9/6)	11
I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp 913,510,900		25%	Rp 224,888,710	30%	
1 Penyediaan Rapat - Rapat, Konsultasi, dan Koordinasi	Jumlah bulan	12 bulan	Rp 464,038,300	3 bulan	25%	Rp 139,342,308	30%	
2 Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan	12 bulan	Rp 221,410,200	3 bulan	25%	Rp 47,590,844	21%	
3 Penyediaan Jasa Penujangan Kinerja SKPD	Jumlah Orang	12 bulan	Rp 228,062,400	3 bulan	25%	Rp 37,955,558	17%	
II PEMENUHAN, PENINGKATAN SARANA / PRASARANA KERJA DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			Rp 336,590,000		13%	Rp 59,638,600	23%	
4 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah bulan	12 bulan	Rp 257,790,000	3 bulan	25%	Rp 59,638,600	23%	
5 Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah Orang	3 orang	Rp 65,000,000	0 orang	0%	Rp -	0%	
6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Orang	23 orang	Rp 13,800,000	0 orang	0%	Rp -	0%	
III PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN SKPD			Rp 124,992,000		0.00%	Rp -	0%	
7 Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	Jumlah keg	1 keg	Rp 100,000,000	0 keg	0%	Rp -	0%	
8 Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	Jumlah event	2 kali	Rp 24,992,000	0 kali	0%	Rp -	0%	
IV PENGEMBANGAN INVESTASI DAERAH			Rp 581,228,800		28.33%	Rp 36,778,700		
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kecamatan	5 Kecamatan	Rp 89,970,000	2 Kecamatan	40%	Rp 10,505,000	12%	
10 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Izin	210 Izin	Rp 68,254,900	154 Izin	73%	Rp 8,402,500	12%	
11 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah event	2 event	Rp 423,001,900	0 event	0%	Rp 17,791,200	4%	
V PENINGKATAN REALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAKU JENIS USAHA			Rp 49,900,000		19.57%	Rp 5,510,000		
12 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Jumlah Izin	2626 Izin	Rp 40,000,000	514 Izin	20%	Rp 5,510,000	14%	
13 Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis usaha	Jumlah rapat	10 kali	Rp 9,900,000	0 kali	0%	Rp -	0%	
VI PENINGKATAN REALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAKU NON JENIS USAHA			Rp 196,166,050		15.78%	Rp 18,430,000		

PROGRAM /KEGIATAN		DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2020 (Rp.)	FISIKI KINERJA	%	KEUANGAN	%	KENDALA
3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/6)	11	
I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
14	Penyenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jenis non Usaha	Jumlah izin	456	izin	Rp 913,510,900	151	25%	Rp 224,888,710	42%	
15	Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis non usaha	Jumlah rapat	10	kali	Rp 9,999,800	3	30%	Rp 1,760,000	18%	
VII PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN										
16	Penyebarluasan Informasi Publik	Jumlah jenis	4	Jenis	Rp 108,999,750	1	25%	Rp -	0%	
17	Penyusunan/Revisi Standar Operasional Prosedur	Jumlah Dok	1	Dokumen	Rp 14,999,800	0	0%	Rp -	0%	
18	Penyusunan Data dan bahan Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dok	1	Dokumen	Rp 9,667,000	0	0%	Rp 820,000	8%	
19	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dok	1	Dokumen	Rp 12,499,800	0	0%	Rp -	0%	
VIII PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA SKPD										
20	Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	Jumlah Dok	2	Dokumen	Rp 3,999,900	0	0%	Rp 1,000,000	25%	
21	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dok	48	Dokumen	Rp 5,999,600	12	25%	Rp 1,255,000	21%	
22	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dok	1	Dokumen	Rp 3,999,900	1	100%	Rp 2,090,000	52%	

KEPALA DPMPTSP
Kabupaten Tanah Laut


Drs. JOKO WURYANTORO, M.Si
NIP. 19650116 199203 1 008

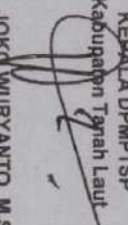
LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TRIWULAN II

PROGRAM /KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA		ANGGARAN 2020 (Rp.)	FISIK/ KINERJA		REALISASI		KEUANGAN	%	PERMASALAHAN / KENDALA
		4	5		7	8=(7/5)	9	10=(9/8)			
I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN											
1 Koordinasi Rapat - Rapat, Konsultasi, dan Koordinasi	Jumlah bulan	12	bulan	Rp 913,510,900	6	bulan	33%	Rp 296,683,898		34%	
2 Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan	12	bulan	Rp 464,038,300	6	bulan	25%	Rp 157,222,154		29%	
3 Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Jumlah Orang	12	bulan	Rp 221,410,200	6	bulan	50%	Rp 64,793,407		29%	
II PEMENUHAN, PENINGKATAN SARANA / PRASARANA KERJA DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA											
4 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah bulan	12	Jenis	Rp 336,590,000	6	bulan	25%	Rp 74,668,337		33%	
5 Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah Orang	3	orang	Rp 267,790,000	0	orang	50%	Rp 146,343,300		57%	
6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Orang	23	orang	Rp 65,000,000	0	orang	0%	Rp -		0%	
III PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN SKPD											
7 Pembinaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	Jumlah keg	1	keg	Rp 13,800,000	0	orang	0%	Rp -		0%	
8 Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	Jumlah event	2	kali	Rp 124,992,000	0	kali	0%	Rp -		0%	
IV PENGEMBANGAN INVESTASI DAERAH											
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kecamatan	5	Kecamatan	Rp 581,226,800	4	Kecamatan	45,00%	Rp 44,836,700		12%	
10 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah izin	210	izin	Rp 89,970,000	210	izin	80%	Rp 11,030,000		16%	
11 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah event	2	event	Rp 68,254,900	0	event	100%	Rp 10,632,500		16%	
V PENINGKATAN REALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAKU JENIS USAHA											
12 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Jumlah izin	2626	izin	Rp 423,001,900	781	izin	29,74%	Rp 23,176,200		5%	
13 Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis usaha	Jumlah rapat	10	kali	Rp 40,000,000	0	kali	30%	Rp 7,930,000		20%	
				Rp 9,900,000			0%	Rp -		0%	

PROGRAM /KEGIATAN			DLM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2020 (Rp.)	FISIKA KINERJA	%	KEUANGAN	%	KENDALA
			4	5	6	7	8=(7/5)	9	10=(9/8)	11
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Rp 913.510,900		33%	Rp 296.893,898		
VI	PENINGKATAN REALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAKU NON JENIS USAHA				Rp 196.166,050		29,20%	Rp 25.150,000		
14	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jenis non Usaha	Jumlah Izin	456	izin	Rp 39.999,900	259	57%	Rp 22.500,000	56%	
15	Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis non usaha	Jumlah rapat	10	kali	Rp 9.999,800	6	60%	Rp 2.650,000	27%	
VII	PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN				Rp 146.166,350		62,50%	Rp 20.746,500		
16	Penyebutan Informasi Publik	Jumlah jenis	4	Jenis	Rp 108.999,750	2	50%	Rp 14.147,700	13%	
17	Penyusunan/Revisi Standar Operasional Prosedur	Jumlah Dok	1	Dokumen	Rp 14.999,800	0	0%	Rp 2.813,800	19%	
18	Penyusunan Data dan bahan Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dok	1	Dokumen	Rp 9.667,000	1	100%	Rp 3.120,000	32%	
19	Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah dok	1	Dokumen	Rp 12.499,800	1	100%	Rp 665,000	5%	
VIII	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA SKPD				Rp 13.999,400		25,00%	Rp 4.345,000		
20	Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	Jumlah Dok	2	Dokumen	Rp 3.999,900	0	0%	Rp 1.000,000	25%	
21	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dok	48	Dokumen	Rp 5.999,600	24	50%	Rp 1.255,000	21%	
22	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dok	2	Dokumen	Rp 3.999,900	1	50%	Rp 2.090,000	52%	

KEPALA DPMPTSP
Kabupaten Tanah Laut

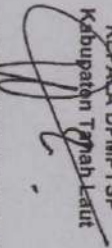

Drs. JOKO WURYANTO, M.SI
NIP. 19650116 199203 1 008

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TRIWULAN III

PROGRAM /KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2020 (Rp.)	REALISASI		KEUANGAN	%	PERMASALAHAN/ KENDALA
				FISIK/ KINERJA	%			
3	4	5	6	7	8=(7/5)	9	10=(9/5)	11
I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp					
1 Penyediaan Rapat - Rapat, Konsultasi, dan Koordinasi	Jumlah bulan	12 bulan	Rp 913,510,900	9 bulan	42%	Rp 501,601,291	43%	
2 Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan	12 bulan	Rp 464,038,300	9 bulan	25%	Rp 197,970,654	43%	
3 Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Jumlah Orang	12 bulan	Rp 221,410,200	9 bulan	75%	Rp 132,922,425	60%	
II PEMENUHAN, PENINGKATAN SARANA / PRASARANA KERJA DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			Rp					
4 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah bulan	12 bulan	Rp 336,590,000	9 bulan	38%	Rp 170,973,000	75%	
5 Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah Orang	3 orang	Rp 267,790,000	0 orang	75%	Rp 170,973,000	66%	
6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Orang	23 orang	Rp 65,000,000	0 orang	0%	-	0%	
III PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN SKPD			Rp					
7 Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	Jumlah kegiatan	1 keg	Rp 124,992,000	0 keg	0.00%	-	0%	
8 Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	Jumlah event	2 kali	Rp 100,000,000	0 kali	0%	-	0%	
IV PENGEMBANGAN INVESTASI DAERAH			Rp					
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kecamatan	5 kecamatan	Rp 581,226,800	5 kecamatan	50.20%	Rp 61,976,200		
10 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Izin	210 izin	Rp 89,970,000	210 izin	100%	Rp 14,330,000	16%	
11 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah event	2 event	Rp 68,254,900	0 event	0%	Rp 15,357,500	23%	
V PENINGKATAN REALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAKU JENIS USAHA			Rp					
12 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Jumlah Izin	2626 izin	Rp 49,900,000	1781 izin	67.82%	Rp 16,745,000	35%	
13 Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis usaha	Jumlah rapat	10 kali	Rp 9,900,000	5 kali	50%	Rp 2,700,000	27%	

PROGRAM/KEGIATAN		DLM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2020 (Rp.)	FISIKI KINERJA	%	KEUANGAN	%	KENDALA
3		4	5	6	7	8=(7/5)	9	10=(9/6)	11
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp 913,510,900		42%	Rp 501,601,291		
VI	PENINGKATAN REALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAKU NON JENIS USAHA			Rp 308,666,050		45,00%	Rp 25,160,000		
14	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jenis non Usaha	Jumlah Izin	456	Rp 39,999,900	456	100%	Rp 22,500,000	56%	
15	Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis non usaha	Jumlah rapat	10	Rp 9,999,800	8	80%	Rp 2,660,000	27%	
VII	PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN			Rp 258,666,350		93,75%	Rp 33,756,000		
16	Penyediaan/luasan Informasi Publik	Jumlah jenis	4	Rp 108,999,750	3	75%	Rp 19,022,700	17%	
17	Penyusunan/Revisi Standar Operasional Prosedur	Jumlah Dok	1	Rp 14,999,800	1	100%	Rp 7,802,500	52%	
18	Penyusunan Data dan bahan Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dok	1	Rp 9,667,000	1	100%	Rp 5,070,000	52%	
19	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dok	1	Rp 124,999,800	1	100%	Rp 1,860,800	1%	
VIII	PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA SKPD			Rp 13,999,400		56,25%	Rp 9,659,000		
20	Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	Jumlah Dok	2	Rp 3,999,900	2	100%	Rp 3,179,000	79%	
21	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dok	48	Rp 5,999,600	36	75%	Rp 3,390,000	57%	
22	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dok	2	Rp 3,999,900	1	50%	Rp 3,090,000	77%	

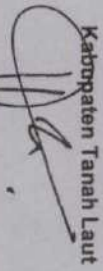
KEPALA DPMPTSP
Kabupaten Tanah Laut

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 19650116 199203 1 008

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

TRIWULAN IV

PROGRAM /KEGIATAN	OUTPUT DLM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2020 (Rp.)	REALISASI		KEUANGAN	%	PERMASALAHAN / KENDALA
				FISIKI/ KINERJA	%			
3	4	5	6	7	8=(7/5)	9	10=(9/8)	11
I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp 781,600,595			Rp 722,734,616		
1 Penyediaan Rapat - Rapat, Konsultasi, dan Koordinasi	Jumlah bulan	12 bulan	Rp 307,448,000	12 bulan	50%	Rp 278,777,754	91%	
2 Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan	12 bulan	Rp 231,460,200	12 bulan	100%	Rp 201,996,481	87%	
3 Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Jumlah Orang	12 bulan	Rp 242,692,395	12 bulan	25%	Rp 241,960,381	100%	
II PEMENUHAN, PENINGKATAN SARANA / PRASARANA KERJA DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			Rp 326,955,000			Rp 207,296,500		
4 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah bulan	12 bulan	Rp 248,155,000	12 bulan	100%	Rp 207,296,500	84%	
5 Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah Orang	3 orang	Rp 65,000,000	0 orang	0%	Rp -	0%	
6 Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Orang	23 orang	Rp 13,800,000	0 orang	0%	Rp -	0%	
III PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN SKPD			Rp 90,000,000			Rp 69,740,000		
7 Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	Jumlah keg	1 keg	Rp 70,000,000	1 keg	100%	Rp 69,740,000	100%	
8 Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	Jumlah event	2 kali	Rp 20,000,000	0 kali	0%	Rp -	0%	
IV PENGEMBANGAN INVESTASI DAERAH			Rp 96,185,500			Rp 77,311,900		
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Kecamatan	5 Kecamatan	Rp 16,290,000	5 Kecamatan	100%	Rp 16,535,000	90%	
10 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Izin	210 izin	Rp 26,349,500	210 izin	100%	Rp 25,128,200	95%	
11 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah event	2 event	Rp 51,546,000	0 event	0%	Rp 35,648,700	69%	
V PENINGKATAN REALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAKU JENIS USAHA			Rp 20,225,000			Rp 20,180,000		
12 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Jumlah Izin	2626 izin	Rp 16,625,000	2626 izin	100%	Rp 16,580,000	100%	
13 Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis usaha	Jumlah rapat	10 kali	Rp 3,600,000	10 kali	100%	Rp 3,600,000	100%	
VI PENINGKATAN REALISASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAKU NON JENIS USAHA			Rp 92,521,300			Rp 25,160,000		

PROGRAM /KEGIATAN	DLM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2020 (Rp.)	FISIKI KINERJA	%	KEUANGAN	%	KENDALA	
	3	4	5	6	7	8=(7/5)	9	10=(9/6)	11
I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
14 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jenis non Usaha	Jumlah Izin	456	Izin	Rp 781,600,595	456	100%	Rp 722,734,616	100%	
15 Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis non usaha	Jumlah rapat	10	kali	Rp 2,957,000	10	100%	Rp 2,660,000	90%	
VII PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DANNON PERIZINAN									
16 Penyebarluasan Informasi Publik	Jumlah jenis	4	Jenis	Rp 39,347,700	2	50%	Rp 39,022,700	99%	
17 Penyusunan/Revisi Standar Operasional Prosedur	Jumlah Dok	1	Dokumen	Rp 11,549,800	0	0%	Rp 9,377,500	81%	
18 Penyusunan Data dan bahan Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dok	1	Dokumen	Rp 6,167,000	1	100%	Rp 5,866,500	95%	
19 Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dok	1	Dokumen	Rp 9,999,800	1	100%	Rp 9,062,300	91%	
VIII PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA SKPD									
20 Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	Jumlah Dok	2	Dokumen	Rp 3,999,900	0	0%	Rp 3,179,000	79%	
21 Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dok	48	Dokumen	Rp 5,999,600	48	100%	Rp 5,249,000	87%	
22 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dok	2	Dokumen	Rp 3,999,900	2	100%	Rp 3,090,000	77%	

KEPALA DPMPTSP
Kantoratan Tanah Laut

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si
NIP. 19650116 199203 1 008

Evaluasi Capaian Indikator SKPD Sesuai dengan Target Renstra (2018-2023)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD						Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020					
1	Persentase kenaikan pelaku investasi	30	36	42	48	54	60	30	37	44					
	Jumlah promosi dan kerjasama investasi	2 kali	1	1	1	1	1	1	1	1					
2	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan Investasi	5 kec/tahun	5	5	5	5	5	5	5	5					
	Persentase permohonan izin yang diverivikasi dan divalidasi perizinan jasa usaha	2382	2501	2626	2757	2.895	3040	2847	3226	2869					
3	Persentase permohonan izin yang diverivikasi dan divalidasi perizinan non usaha	413	434	456	479	503	828	360	547	603					

4	Persentase penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelayanan Permohonan perizinan dan non perizinan	-	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase ketersediaan data perizinan dan non perizinan	-	2935	3082	3236	3398	3568	3207	3773	3472									
7	Persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penyerapan anggaran DPMP/TSP		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100


Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

Drs. JOKO WURYANTO, M.Si.
NIP. 19650416 199203 1 008

**MATRIKS KESELARASAN
KESELARASAN KINERJA - OUTPUT - PENGANGGARAN**

No	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis Berorientasi / Hasil (V/T)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Berwujud (V/T)	IKU / Bukan IKU	No	Program			Program Terkait Dengan Sasaran (V/T)	Kegiatan				Kegiatan Terkait Dengan Sasaran (V/T)	Anggaran terkait	Ket
							Urutan Program	Sasaran Program	Target Sasaran Program		Urutan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Meningkatkan Kualitas Investasi di Kabupaten Tanah Liat		Persentase nilai Investasi		IKU		Program Pengembangan Investasi	Jumlah realisasi Investasi	5%		Pengembangan Perizinan dan Non Perizinan Pendirian Modal	Pelaku usaha	Jumlah Perizinan yang terbit		26.349.500		
2	Meningkatkan Jumlah Pelaku Investasi		Persentase Pemaksimalan Pelaku Investasi		IKU		Program Pengembangan Investasi	Jumlah realisasi Investasi	5%		Pengoptimalan Perizinan dan Non Perizinan dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaku usaha	Jumlah Perizinan yang terbit		51.546.900		
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan		Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan						Baik		Penyusunan Data dan Bahan Perizinan dan Non Perizinan	Pelaku usaha	Jumlah Perizinan yang terbit		5.167.000		
4	Meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan						Baik		Penyusunan, visi standar Operasional Prosedur	Pelaku usaha	Jumlah SOP Perizinan dan Non Perizinan		11.548.800		
5	Meningkatkan Penamban Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha		Persentase Peningkatan Izin Yang Divalidasi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha						Baik		Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha	Pelaku usaha	Jumlah izin yang dikeluarkan		16.625.000		
6	Meningkatkan Penamban Perizinan dan Non Perizinan Tertentu		Persentase Peningkatan Izin Yang Divalidasi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu						Baik		Koordinasi antar Tim Teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis usaha	Tim Teknis	Jumlah rapat koordinasi		3.600.000		
7	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Peningkatan Izin Yang Divalidasi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu						Baik		Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Usaha	Masyarakat pelaku usaha	Jumlah media penyediaan informasi pelayanan publik		22.500.000		
															39.347.700		

No	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis Berorientasi Hasil (VIT)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Berbasis Kualitas (VIT)	IKU / Bahan IKU	No	Program			Program Terkait Dengan Sasaran (VIT)	Kegiatan			Kegiatan Terkait Dengan Sasaran (VIT)	Anggaran terkait	Ket
							Urutan Program	Sasaran Program	Target Sasaran Program		Urutan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan			
1																
8	Meningkatnya ketahanan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan		Persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan				Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	IKM	Baik		Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah tick		3.999.900	
9	Meningkatnya kelancaran Administrasi Umum dan Kepegawaian		Persentase terwujudnya administrasi kepegawaian umum dan kepegawaian				Pelayanan Administrasi Kepegawaian	IKM	Baik		Pengadaan Ruang - Ruang Kantor, Gedung, Kebutuhan dan Perlengkapan Kantor	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah orang		307.448.000	
10	Meningkatnya Pelayanannya Administrasi Keuangan		Persentase Penyerapan Anggaran DPMPTSP				Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	IKM	Baik		Perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi SKPD	Seluruh Bidang di DPMPTSP	Jumlah dokumen		5.999.600	

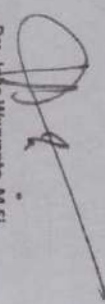
Kasalbar, 31 Desember 2020
 Kepala DPMPTSP Kab. Tanah Liat

 Drs. GOKO WURYANTO, M.Si
 NIP. 19600118 192503 1 008

MONITORING RENCANA AKSI KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SASARAN			KEGIATAN		KETERANGAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Keuangan	%		
Meningkatkan Jumlah Pelaku Investasi	Persentase Kenaikan pelaku Investasi	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	2 Kesepakatan 1 Kesepakatan 2 Kesepakatan 1 Kesepakatan	Program Pengembangan Investasi Daerah	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah kesepakatan Jumlah perizinan dan non perizinan penanaman modal	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	3 Kesepakatan 2 Kesepakatan 4.725.000 9.770.700	8.482.500 2.150.000 4.725.000 9.770.700	95,36
Jumlah Promosi dan kerja sama Investasi	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	52 lzin 53 lzin 52 lzin 53 lzin		Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Dokumen	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	0 17.791.200 5.385.000 9.112.500 3.360.000	69,16		
Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investasi	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	2 kec 2 kec 1 kec 2.205.000		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring dan evaluasi	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	10.505.000 525.000 3.300.000 2.205.000	90,40		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap perizinan dan Non Perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	100%	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya survey IKM	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	0 665.000	5,32		
Meningkatkan efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase penyelesaian Pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	29 aduan 30 aduan 30 aduan 30 aduan			TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	0 14.147.700 4.875.000 20.000.000	99,17		
Persentase Pelayanan Pemohonan Perizinan dan Non Perizinan	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	770 771 770 771		Peperbar/luasn informasi pelayanan publik	Jumlah penyiaran Jumlah balaho Jumlah leaflet	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	0 14.147.700 4.875.000 20.000.000	99,17		
				Penyusunan/revisi	Jumlah Dokumen	TRI 1	0	0		

Jumlah				Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	Pembuatan dan pemeliharaan sistem	1 Kali	TRI 1	TRI 2	TRI 3	TRI 4	0	99,63
							0	0	0	0		
						1 Kali	TRI 1	0	0			
					Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan		TRI 2	0	0			
							TRI 3	0	0			
							TRI 4	0	0			
											880,382,998	

Kepala Dinas PM & PTSP


 Drs. Joko Wuryanto, M.Si
 NIP. 1965011619921008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 180.a/DPMPSTSP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai implementasi *Good Governance* dalam sistem pemerintahan diperlukan adanya pelaporan pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan Sasaran instansi pemerintah dan mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana kinerja tahunan;
 - b. bahwa untuk mengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah maka langkah yang dilakukan adalah dengan membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), perlu dibentuk Tim;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Berita Negara Republik Indonesia ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

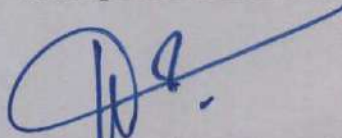
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
 - b. mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim dalam merumuskan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
 - c. Pengumpulan data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
 - d. menelaah dan memahami bahan yang telah disiapkan juga menganalisa data dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
 - e. mengoreksi dalam penyelesaian pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Kabupaten Tanah Laut;
 - f. mendiskusikan dengan Bidang terkait sehubungan pencarian data tambahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Kabupaten Tanah Laut; dan
 - g. mengadakan perbaikan atau perubahan sehubungan pemantapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 06 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,



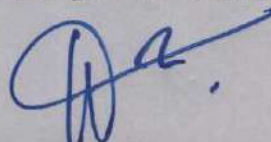
Drs. Joko Wuryanto, M.Si
NIP. 1965011619921008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP
NOMOR : 188.45/ -TU/2021
TANGGAL : 06 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
2.	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota
4.	Kepala Bidang Perizinan Tertentu	Anggota
5.	Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha	Anggota
6.	Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan	Anggota
7.	Kasi Data dan Informasi	Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. Joko Wuryanto, M.Si
NIP. 1965011619921008